

**BELUM DIKOREKSI**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH  
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI V DPR RI DENGAN  
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI**

**KAMIS, 6 SEPTEMBER 2018**

- Tahun Sidang : 2018 – 2019  
Masa Sidang : I  
Rapat : Ke -  
Jenis Rapat : Rapat Kerja  
Hari/Tanggal : Kamis, 6 September 2018  
Sifat : Terbuka  
Pukul : 14.00 WIB s.d 18.20 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V),  
Gedung Nusantara DPR RI.  
Acara : Membahas RKA-K/L Kementerian Pekerjaan Umum  
dan Perumahan Rakyat dalam nota Keuangan RAPBN  
TA 2019  
Ketua Rapat : Ir. Fary Djemy Francis, MMA  
Sekretaris : Dra. Prima MB. Nuwa, Msi  
Hadir Anggota : dari 51 orang Anggota Komisi V DPR RI  
Hadir Mitra : Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
beserta jajaran.

**Jalannya rapat,**

**KETUA RAPAT/F-GERINDRA (IR. FARY DJEMY FRANCIS, MMA):**

**Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua.  
Shalom.**

**Yang terhormat, Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI,  
Saudara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat beserta  
seluruh jajarannya, serta  
Para Hadirin yang saya muliakan.**

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab kita dalam keadaan sehat wal'afiat.

Berdasarkan informasi dari sekretariat bahwa daftar hadir Anggota Komisi V DPR RI yang telah ditandatangani sebanyak 27 anggota, terdiri dari 8 fraksi dari 10 fraksi, atau lebih dari separuh unsur fraksi, sehingga telah memenuhi korum.

Oleh karena itu sebagaimana ketentuan Pasal 245 Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, ijinakan saya membuka rapat pada hari ini. Dan berdasarkan ketentuan Pasal 240 ayat (1) rapat kerja hari ini kita nyatakan terbuka untuk umum.

**KETOK PALU : 1 KALI  
(Rapat di buka pukul: 14.20 WIB)**

Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Saudara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat beserta seluruh jajarannya yang telah memenuhi undangan kami dalam rapat kerja pada hari ini.

**Saudara Menteri dan para Anggota Komisi V, serta Pimpinan yang kami hormati,**

Sesuai dengan Surat Pimpinan Badan Anggaran DPR RI Nomor AG-12626/DPR-VII/2018 tanggal 24 Juli 2018 perihal penyampaian rancangan jadwal pembicaraan tingkat satu pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2019 untuk pembahasan tahap pertama Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga mitra kerjanya setiap komisi dialokasikan waktu pada tanggal 4 sampai 14 September 2018, dan hasil pembahasannya akan disampaikan secara tertulis kepada Badan Anggaran DPR RI untuk di sinkronisasikan.

Selanjutnya, pembahasan tahap kedua untuk penyesuaian RKAKL dialokasikan waktu pada tanggal 28 September sampai 5 Oktober 2018. Jadi ini adalah pembahasan lanjutan kita untuk APBN yang sudah dilaksanakan di bulan Juni dan Juli. Hari ini adalah kita akan mendengarkan kebijakan-kebijakan dari Pak Menteri dalam rangka ini. Dan kemudian kita akan lanjutkan dalam pembahasan mulai minggu dengan para eselon satu. Dan

hasil pembahasan daripada eselon satu kita akan rapat kerja lagi sebelum kita bawa ke Banggar. Itu untuk tahap pertama. Sehingga hari ini sebenarnya kita ingin mendengarkan kebijakan-kebijakan dari Pak Menteri dari hasil RDP kita dengan eselon satu pada bulan Juli kemarin. Ada beberapa catatan-catatan, nanti kami akan sampaikan. Kita bicara berkaitan dengan kebijakan Pak Menteri untuk kita bahas secara detailnya dengan para eselon satu mulai minggu depan.

Terkait dengan pembahasan RKA Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2019 pada hari ini perlu kiranya kita bangun kesepahaman bahwa rapat kerja pada hari ini merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2019 yang telah kita laksanakan pada bulan Juni sampai dengan bulan Juli 2018 yang lalu. Oleh karena itu dalam kesempatan rapat kerja hari ini tentunya kita bisa lebih fokuskan dalam hal bagaimana program-program strategis nasional yang bermanfaat bagi rakyat, serta program-program yang dibutuhkan oleh masyarakat pada khususnya di daerah kabupaten/kota tertentu sebagaimana pendapat/usulan dan saran yang disampaikan oleh Komisi V DPR RI dalam rapat-rapat terdahulu yang mungkin bisa di akomodir atau di realisasi sesuai dengan Pagu Anggaran Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2019.

Sebelum kita membahas lebih lanjut, pokok acara pada hari ini perlu kiranya kami informasikan hasil pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2019 yang disepakati dalam raker dengan Menteri PUPR pada tanggal 6 Juni dan Pagu Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2019, yaitu:

- Pagu kebutuhan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar 138 triliun 363 miliar 546 juta 004 ribu rupiah;
- Penyesuaian pagu indikatif 102 triliun 17 miliar 1 juta 436 ribu rupiah;
- Pagu anggaran Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2019 110 triliun 731 miliar 599 juta 335 ribu rupiah.

Oleh karena itu terdapat pendanaan melalui skema Kerjasama Pemerintah-Badan Usaha *Availability Payment* (KPBUAP) pada Kementerian PUPR sebesar 5,1 triliun.

**Saudara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pimpinan serta Anggota Komisi V DPR RI yang kami hormati.**

Demikian pengantar dari kami, dan selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Saudara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk menyampaikan penjelasan pokok-pokok kebijakan Rencana Kerja Anggaran Kementerian PUPR dalam Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2019. Untuk penjelasan dan pembahasan yang lebih detail akan kita lakukan pada rapat dengar pendapat dengan masing-masing unit organisasi eselon satu Kementerian PUPR yang kita agendakan mulai minggu depan.

Pak Menteri, paling tidak ada 4 catatan yang penting yang menjadi isu bersama kita pada saat kita rapat dengar pendapat dengan para eselon satu:

Yang pertama berkaitan dengan bentuk atau bahan persentase. Bahan persentase kita minta untuk formatnya untuk nanti kita bahas bersama. Itu sudah mesti detail berkaitan dengan program-program para eselon satu di

setiap provinsi. Bukan berarti kita mau bahas satuan tiganya, tapi program-program dan nilainya itu sudah harus kita dapatkan pada saat eselon satu. Jadi kita presentasi bukan kita presentasi dengan masyarakat, kita ini pembahasan anggaran. Jadi harus dibedakan presentasi dengan masyarakat dengan kita sedang pembahasan anggaran. Dan kemarin saya kira dari Kementerian Perhubungan dan Kementerian Desa Daerah Tertinggal sudah menjalankan itu, dan saya kira kita tidak lama sekali membahasnya. Nanti provinsi ini/daerah ini untuk jalan apa-apa programnya, dengan nilainya. Tapi bukan satu tiga kita minta. Programnya. RDP Pak, bukan sekarang ini Pak. Itu isunya yang terjadi dalam pembahasan kita di eselon satu.

Yang kedua, program-program yang berkaitan langsung dengan masyarakat. Itu mendapat apresiasi. Terutama program-program yang berkaitan dengan seperti TGAI, itu salah satu terobosan untuk menjawab persoalan irigasi di daerah yang prosentasenya masih belum di capai. Dan kemarin itu catatannya 8.000. Terus kemudian setelah kita bahas-bahas itu di tambah lagi jadi 9.000. Kalau bisa itu di tambah lagi yang seperti itu, sehingga capaian untuk irigasi daerah itu bisa. Ini salah satu program yang strategis dan di dukung penuh oleh DPR. Termasuk program-program perumahan, perumahan swadaya. Yang seperti ini kebijakan Pak Menteri kalau memang kita bisa sepakati untuk kita tambahkan saya kira mestinya kita nanti bahasnya lebih detail di eselon satu.

Pisau Pak, Pisau saya kira kita tetap dukung. Tetapi mungkin mekanismenya, karena itu intervensi dari pemerintah daerah, terutama camat, itu tinggi sekali. Kita tetap pertahankan, tapi nanti mekanismenya itu yang harus kita bangun. Sehingga ini program memang betul-betul lahir dari hasil kunjungan kerja para anggota dan juga dari pusat sehingga mereka tahu bahwa ini adalah program-program yang di dukung oleh DPR RI.

Termasuk dengan jembatan gantung. Jembatan gantung ini juga menjadi program yang kita anggap bahwa sangat dibutuhkan dalam persoalan-persoalan kebijakan jalan di daerah. Konektifitas untuk itu kita minta diperbanyak. Dan beberapa program-program kemasyarakatan lain yang menjadi konsern para teman-teman.

Dan kita minta di akhir tahun ini semua program kemasyarakatan itu kita minta supaya penerimaan manfaatnya itu kita mau monitoring dan evaluasi. Teman-teman dari Dirjen Sumber Daya Air sudah lakukan di beberapa tempat, itu bagus. Kita mau tanya, apakah itu program irigasi itu di terima betul tidak dan ada manfaatnya, kita mau kumpulkan dan kita mau tanya. Saya kira Pak Menteri bisa pahami itu.

Dan juga untuk tahun 2019 sebelum diserahkan kita juga mau kumpulkan untuk kita mengecek bahwa apakah betul-betul kelompok itu sudah siap untuk dilaksanakan.

Itu catatan-catatan yang kami dapatkan. Dan kebijakan ini yang kita mau terima saja dari Pak Menteri, dan kemudian nanti detailnya akan kita bahas bersama dengan eselon satu.

Terakhir, teman-teman memberikan apresiasi kepada sumber daya air. Masih banyak target 5 tahun yang belum tercapai. Untuk itu kita memberikan dukungan supaya sumber daya air ini bisa ditambahkan anggarannya. Entah itu mau di ambil dari direktorat lain. Tapi salah satu catatan penting adalah,

sumber daya air itu kita minta supaya ditambahkan terobosan-terobosan berkaitan dengan irigasi, dan juga berkaitan dengan pantai itu, air bersih, dan sebagainya.

Ini saja kebijakan ini yang kita minta Pak Menteri untuk bisa menyampaikan kepada kita, dan kemudian kita akan membahas itu dengan para eselon satu mulai hari Rabu.

Saya kira itu catatan kami, terima kasih. Kami serahkan sepenuhnya kepada Pak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Silakan Pak. Supaya lebih cepat, saya minta apa yang saya sampaikan tadi para anggota apakah ada yang perlu ditambahkan?

Saya kasih kembali dulu ke anggota, Pak Lasarus.

#### **F-PDIP (LASARUS, S.Sos):**

Terima kasih.

**Pak Menteri yang saya hormati,  
Sekjen, para Dirjen, dan seluruh jajaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang saya hormati,  
Pimpinan dan segenap Anggota Komisi V yang saya banggakan.**

Saya sepakat dengan mekanisme yang tadi disampaikan. Nanti kalau kita pun panja sekarang dengan eselon satu kan kita kupas masing-masing nanti. Detail kita inikan di eselon satu nanti. Jadi saya sepakat itu yang pertama.

Yang kedua, memang karena waktu kita tidak panjang, dengan Badan Anggaran kita sendiri tidak tahu/belum tahu asumsi, di Banggar kan belum selesai juga setahu saya teman-teman di Banggar. Belum kan, masih jauh juga kalau saya lihat. Tapi panja ini masih panjang saya dengar, jadi juga akan ada perubahan-perubahan lagi kelihatannya nanti.

Tapi kita kan kalau soal angka menurut saya soal angka inikan tentu menyesuaikan nanti. Tapi yang paling penting sejauhmana nanti teman-teman disini punya program yang ingin di dapil masing-masing kan bisa tersampaikan dengan baik, dan bisa mendapat respon yang baik pula dari mitra kerja. Kan begitu yang kita harapkan. Ini menurut saya sangat penting.

Memang nanti waktu kita dengan eselon satu saya rasa apa yang disampaikan oleh teman-teman ini nanti bisa mendapat perhatian dari teman-teman eselon satu.

Saya rasa itu saja dulu sebagai pengantar dari saya, Pak Ketua, terima kasih.

***Assalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.***

#### **F-PD (DRH. JHONI ALLEN MARBUN, M.M):**

Saya tambahkan sedikit, Pak Ketua.

Pertama saya kira apa yang disampaikan oleh Pimpinan adalah merupakan bagian daripada masukan kebijakan antara legislatif dan eksekutif

di dalam membangun negara kesatuan Republik Indonesia dari perhubungan perumahan kementerian. Oleh karena itu, itu adalah undang-undang, artinya terjadi sinkronisasi dari konteks sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan persyaratan-persyaratan yang ada. Kalau itu tidak terjadi, DPR punya hak *budgetting* bisa menerima dan bisa menolak. Dan itu undang-undang, karena kita bicara undang-undang. Artinya, membangun dari semua jajaran kepulauan yang ada di Indonesia ini adalah membangun negara kesatuan Republik Indonesia.

Usulan dari para anggota dewan tentunya yang mewakili daerahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan konteks alokasi anggaran disitu proporsional dari konteks kebijakan pemerintah dan kondisi eksisting yang diusulkan atau yang di lihat oleh anggota DPR adalah merupakan sinkronisasi kebijakan. Oleh karena itu saya kira poin itu yang menjadi penting masukan atau katakanlah catatan tadi sehingga Pak Menteri bisa menginikan pada kesimpulan rapat ini kepada jajaran dibawahnya. Karena jajaran dibawahnya saya kira adalah melaksanakan hal-hal yang menjadi kebijakan antara eksekutif dan legislatif. Saya kira itu poinnya, Pimpinan.

Satu lagi, untuk menterjemahkan itu di dalam konteks merealisasikannya ada rencana kegiatan kementerian dan kelembagaan. Ini hanya masih bicara pagu, tapi saya kira nanti dalam konteks kesana sudah harus *clear* sampai program satuan kerja, tidak perlu satuan tiga. Tapi disini hanya masih pagu anggaran, masih lebih kepada perspektif. Itu format daripada pembahasan anggaran rencana kegiatan kementerian dan lembaga.

Saya kira itu poin penting yang bisa saya sampaikan, terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Pak Menteri sudah bisa Pak? Kalau begitu kita dengar dulu Pak Menteri sampaikan.

#### **MENTERI PUPR:**

***Bismillaahirrohmaanirrohiim.***

**Bapak Pimpinan, Ibu-ibu dan Anggota Komisi V DPR RI yang kami cintai, kami banggakan.**

Sebelum kami melaporkan tentang RKAKL 2019, kami menanggapi catatan Bapak Pimpinan tentang RDP. Sebelumnya kami laporkan bahwa kami ditemani oleh seluruh eselon satu. Kecuali Dirjen Cipta Karya yang agak terlambat nanti akan hadir. Sudah ada? Terima kasih, jadi seluruh eselon satu ada. Jadi tadi yang di minta oleh Komisi V DPR RI bahwa format untuk pembahasan RDP agar lebih detail, kegiatan sampai dengan lokasi, sampai dengan kabupaten mungkin. Tidak cukup provinsi, tapi kabupaten. Kita masih punya satu minggu saya kira, tanggal 12 kami mulai. Jadi agar para eselon satu menyiapkan format ini di bawah koordinasi Ibu Sekjen.

Yang kedua, program langsung untuk masyarakat. Untuk padat karya tunai irigasi misalnya dan pisu kami ingin menyarankan kalau bisa lokasinya bisa disepakati awal-awal, sehingga mulai Januari sudah mulai bisa dikerjakan. Kalau mulai Januari sudah bisa dikerjakan *Insyaa Allah* ada

manfaatnya buat kita semua, khususnya bagi Bapak-bapak di dapil. Kalau Desember disepakati di SK kan, Januari-Februari bisa kita mulai. Karena selama ini kalau saya minta cepat pada Dirjen SDA katanya belum disepakati oleh Komisi V. Jadi kalau khusus 2019 ini isu padat karya irigasi bisa disepakati lebih awal di SK kan semua mendapatkan keuntungan untuk itu. Masyarakat mendapat, kita semua ada manfaatnya. Kemudian untuk SDA akan di tambah pagunya saya kira nanti akan kami laporkan dalam kesempatan ini. Terima kasih Bapak.

Kemudian kita masuk pada pembahasan RKAKL 2019. Sebelum memasuki RKAKL, ijinkan kami melaporkan sedikit saja progres pelaksanaan 2018. Sampai dengan 5 September 2018 ada 4 progres kita keuangan pada 2018 ini adalah 52,1 triliun, atau 45,76 persen. Fisiknya sendiri 50,22 persen. Sedangkan pagu pada 2018 ini adalah 113,856. Mudah-mudahan prognosis kami masih sekitar 90 persen pada akhir Desember 2018 ini.

Kemudian pokok-pokok kebijakan belanja untuk 2019. Pertama, kami melaksanakan *directive* presiden, wakil presiden, hasil sidang kabinet, raker, RDP, dan kunker DPR. Ini menjadi prioritas pemrograman 2019. Jadi saya kira ini menjadi kesepakatan kita bersama.

Kemudian pembangunan berbasis wilayah pasti kami mempunyai kriteria-kriteria, selain juga menjadi tugas pokok fungsi dari Kementerian PUPR, termasuk juga pada pembangunan yang berbasis kewilayahan.

Kemudian tidak ada *multi years* kontrak yang baru atau tahun jamak yang baru. Kecuali untuk bendungan yang belum ditenderkan pada tahun ini, sehingga tahun 2019 ada 8 bendungan. Dan irigasi atau.....yagn mendukung fungsi bendungan, sehingga bendungan yang sudah jadi akan dapat segera dimanfaatkan airnya. Selain itu tidak ada kegiatan tahun jamak yang baru yang akan diusulkan pada tahun 2019.

Yag keempat adalah prioritas program padat karya. Ini yang tadi disarankan oleh Bapak Ketua Komisi V DPR RI untuk ditambahkan pada tahun 2019 ini.

Kemudian, penyelesaian pekerjaan yang tepat waktu. Dengan tidak adanya .....baru, semua kegiatan difokuskan pada kegiatan yang sudah berjalan, sehingga tidak ada kegiatan yang ditinggalkan sebelum selesai. Lain dengan pekerjaan yang memang belum selesai dengan pekerjaan yang di tinggal sebelum selesai. Kami menghindari pekerjaan yang di tinggal sebelum selesai.

Kemudian yang keenam adalah pemanfaatan hasil-hasil litbang untuk solusi teknologi. Jadi seperti halnya yang di Lombok ini salah satunya adalah teknologi risa yang akan kita gunakan untuk membantu pembangunan rumah-rumah masyarakat.

Selain prioritas pemrograman, belanja barang yang akan dialokasikan pada 2019 dengan melanjutkan efisiensi dan kebijakan *flat policy*, jadi tidak lebih besar dari belanja barang 2018. Namun untuk perjalanan dinas, paket-paket pertemuan dan honor-honor kegiatan, jadi yang bersifat belanja barang tidak boleh lebih dari 2018. Kemudian belanja pemeliharaan memperhitungkan ....BMN (Barang Milik Negara).

Dan penajaman dan efisiensi belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat/pemda, termasuk pengembangan perumahan MPR. Ini termasuk belanja barang yang berkarakter belanja modal. Kita membangun tapi diserahkan kepada masyarakat atau pemda.

Kemudian penajaman dana dukungan kelayakan dan fasilitas untuk mendorong peran KPBU. Ini kita siapkan studi-studi kelayakannya untuk bisa ditawarkan melalui peran serta swasta.

Untuk meningkatkan kualitas belanja modal untuk meningkatkan kapasitas produksi dan konektivitas. Yang kedua, pengembangan konektivitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi jalur utama logistik dan integrasi antar modal untuk pengembangan wilayah strategis. Jadi kami tingkatkan koordinasi dengan Perhubungan, dengan Pariwisata, untuk bisa memanfaatkan pelabuhan-pelabuhan yang sudah di bangun tapi belum ada jalur-jalur konektivitasnya kita utamakan untuk dikerjakan. Kemudian, efisiensi belanja gedung perkantoran baru dan kendaraan bermotor.

### **Bapak Ketua, Bapak/Ibu Anggota Komisi V,**

Nota keuangan seperti yang disampaikan tadi total ada 110 triliun 731 miliar. Tambahannya adalah 8 triliun koma 713, terdiri dari 2,147 triliun untuk mempercepat pencapaian RPJMN, dan 6,5 triliun untuk bisa membantu prasarana pendidikan dalam rangka peningkatan pembangunan sumber daya manusia, sesuai dengan arahan sidang kabinet dan dilakukan melalui surat bersama Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas.

Detailnya adalah sebagai berikut:

Dalam rangka untuk menambah anggaran prioritas dalam pencapaian RPJMN, Ditjen Binamarga mendapat tambahan 1 triliun rupiah untuk preservasi jalan sepanjang 9,2 kilometer, yaitu jalan trans Papua dan batas kota Serang-Pandeglang. Kemudian pembangunan jalan 63,93 kilometer antara lain untuk pembangunan perbatasan di NTT, trans Maluku, kawasan wisata Likupang, Labuan Bajo, dan Lingkar Nias. Jembatan 428,16 meter, jembatan perbatasan di NTT dan trans Papua, dan jalan bebas hambatan untuk lanjutan jalan bebas hambatan Balikpapan Samarinda. Untuk yang Serang-Palembang nanti akan kita lakukan dengan *loan*, dan juga dengan KPBU.

Kemudian di Ditjen Cipta Karya akan mendapat tambahan 272 miliar. Untuk pengembangan SPAM 276 meter kubik per detik di Tanjung Lesung, Tanjung Kelayang, Teburejo, Pentanglong, dan desa-desa rawan air di Sulawesi Tengah dan NTT.

Dan Ditjen SDA mendapat tambahan 822 miliar, antara lain untuk pengendalian banjir, pengamanan abrasi pantai, kemudian pembangunan bendung dan jaringan irigasi, serta pembangunan tanggul penahan lumpur Sidoarjo.

Sedangkan untuk yang penguatan SDM tahun 2019 tambahan anggaran sebesar 6,5 triliun, diperuntukkan:

1. Sarana pendidikan sebesar 6,534 triliun untuk rehabilitasi sekolah yang rusak, penyelesaian pembangunan kampus yang belum selesai, rehabilitasi madrasah dan perguruan tinggi agama. Disana sudah dicantumkan besarnya, yaitu rehabilitasi ruang kelas sebanyak 14.150 ruang dengan pagu 3,8 triliun, rehabilitasi ruang kelas madrasah dan sekolah keagamaan sebanyak 2.907 ruang dengan pagu 769 miliar, penyelesaian konstruksi dalam pengerjaan di perguruan tinggi sebanyak 9 lembaga dengan pagu



350 miliar, dan penyelesaian konstruksi dalam pengerjaan perguruan tinggi negeri sebanyak 36 lembaga dengan pagu 1,6 triliun.

Sedangkan di Ditjen Bina Konstruksi dilakukan untuk peningkatan pendidikan vokasi 8.000 siswa SMK, 6.000 mahasiswa politeknik, dan 2.000 mahasiswa universitas.

Sedangkan kerjasama pemerintah-badan usaha dengan model *availability payment* tahun 2019:

1. Untuk preservasi jalan lintas timur Sumatera 1,14 triliun. Jadi nanti di jalan Sumatera lintas timur mudah-mudahan terjaga kondisi jalannya;
2. Preservasi jalan trans Papua, Wamena-Mamugu, 1,92 triliun;
3. Penggantian jembatan di lintas utama Pulau Jawa 0,8 triliun.....;
4. Preservasi jalan dan jembatan di lintas tengah dan barat Pulau Sumatera sebesar 1,24 triliun.

Sehingga total untuk KPBU adalah 5,1 triliun. Dengan demikian demikian total anggaran yang dipertanggungjawabkan oleh Kementerian PUPR adalah 110,7 di tambah 5,1 sama dengan 115,8 triliun.

Penyesuaian nota keuangan tadi setelah ditambahkan dengan tambahan 8,7 tadi adalah sebagai berikut:

Di Sekretariat Jenderal tetap. Di Inspektorat Jenderal tetap. Di Ditjen Bina Marga menjadi 40,3 triliun. Ditjen Cipta Karya menjadi 20,2 triliun. Sumber Daya Air 39,7 triliun. Ditjen Penyediaan Perumahan 7,8 triliun. Kemudian Pembiayaan Perumahan 261 miliar. Balitbang 540 miliar. Bina Konstruksi 558 miliar. Badan Pengembangan Status Wilayah 228 miliar. Dan PPSDM 398 miliar.

Target pagu anggaran 2019 bidang Sumber Daya Air ini nanti yang akan diterjemahkan di dalam format RDP menjadi dengan kabupaten. Saya kira ini gelondongannya, nanti Ditjen SDA dan Sekjen, di bantu oleh Biro Perencanaan menerjemahkan ini lokasi sampai dengan kabupaten *Insyah Alloh*.

Jadi untuk 39,726 bidang Sumber Daya Air untuk padat karya irigasi 1,8 triliun. Ini masih 8.000 lokasi. Kalau tadi disarankan menambah menjadi 9.000 saya kira mungkin bisa kita lakukan itu.

Kemudian untuk operasi dan pemeliharaan 3 triliun. Dukungan manajemen 2,9 triliun, yaitu untuk pelaksanaan tugas teknis. Kemudian Dewan Sumber Daya Air Nasional dan Pembinaan Tata Kelola SDA. Dan pengendalian lumpur Sidoarjo 425 miliar.

Secara program untuk irigasi, yaitu program irigasi permukaan, rawa, dan tambak sebesar 11 triliun. Untuk pembangunan irigasi 42 ribu hektar, yaitu di daerah irigasi Bali Asih, daerah irigasi Komering, daerah irigasi Jambu Aye, daerah irigasi Loguci, daerah irigasi Batang Aseh, di Ikaluku, Batang Bayang, dan Lematang. Kemudian rehabilitasi irigasi 120 ribu hektar di Humbasa, Manganti, Serayu, Ciujung, Tapin, dan Boru.

Kemudian untuk pengendali banjir dan pengamanan pantai sebesar 5,2 triliun, yaitu pengamanan pantai sebesar 13 kilo meter di Miangas, Marore, Pantai Jakarta yaitu untuk NCICD, Pantai Jangor, Caringin, Kemuning, Pantai Karya Tani. Ini sebagian saja, tapi pada detailnya nanti.

Pengendalian banjir 38 kilo di Sungai Sadar, Mamasa, Warmare, Sukat Mati, Selat Weh, Cisangkui, Cisadane, dan Palu. Dan pengendalian lahan

dan sedimen 13 unit di Gunung Merapi, Gamalama, Sinabung, Batang Kuranji, Sungai Matakabo, dan Air Dingin.

Kemudian bendungan dan embung sebesar 12 triliun, yaitu pembangunan 48 bendungan. Yang 8 adalah baru, yaitu di Kolhua, antara lain Riam Kiwa, Jeragung, Jenelata, dan Lambaai. Sedangkan 40 bendungan yang sedang dalam pelaksanaan di lapangan sekarang antara lain Bendungan Kerto, Kuil, Pamukulu, Bendo, Ciawi, Sukamahi, Karian, Napungkete, dan Weiapo. Serta pembangunan embung baru sebanyak 122.

Untuk program air tanah dan air bagus sebesar 3,1 triliun, yaitu pembangunan air baku sebesar 5 meter kubik per detik untuk Kerta Mantul, Sungai Maro, Waduk Jati Gede, Semarang Barat, Banjar Bakula, dan Kalimati.

Untuk bidang Bina Marga, Bapak Pimpinan dan Bapak/Ibu Anggota, sebesar 40,3 triliun di luar KPBU. Pertama adalah untuk preservasi jembatan sebesar 4 triliun untuk mempreservasi sepanjang 511 ribu meter. Kemudian pembangunan jalan tol sebesar 1,9 triliun, yaitu jalan tol di Cisumdawu, Balikpapan, Samarinda, dan Manado-Bitung yang menjadi PJF APBN.

Kemudian pembangunan jembatan 3,7 triliun. Untuk pembangunan jembatan 10 ribu kilometer antara lain di perbatasan Kalimantan, NTT, Trans Papua, Balang-Dua, Sumbang-Samba, Teluk Kendari dan Sealala.

Kemudian pembangunan *fly over* dan *underpass* 1,7 triliun yaitu sepanjang 4.200 meter, di *underpass new Jogjakarta international airport*, Kentungan di Kali Urang, *fly over* Pantaloan, *fly over* Martadinata di Bogor, dan *underpass* Karang Sawah.

Kemudian pembangunan jalan 6,2 triliun, antara lain sepanjang 686 kilometer di trans Papua, perbatasan Kalimantan, NTT, Gorontalo *Auto Ringroad*, dan Pantai Selatan Jawa.

Kemudian preservasi jalan 19 triliun. Ini juga pemeliharaan sepanjang 47.000 kilometer. Sedangkan dukungan manajemennya sendiri sekitar 2,7 triliun. Target untuk bidang keciptakarya sebesar 20,2 triliun adalah untuk kawasan permukiman sebesar 2,5 triliun, yaitu untuk penanganan permukiman kumuh, kawasan permukiman pedesaan, isu 100 kawasan, dan infrastruktur permukiman kumuh di KSPN Labuan Bajo, dan bangunan gedung dan lingkungan sebesar 3,8 triliun untuk penyelenggaraan pembangunan gedung, dukungan PON Papua, pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia sebesar 430 miliar. Kemudian renovasi Masjid Istiqlal 44, kebun raya, dan penataan KSPN, yaitu Toba, Borobudur, Mandalika, dan Morotai.

Untuk penyediaan air minum dianggarkan 4 triliun, yaitu pengembangan SPAM sebesar 3.462 liter perdetik. Di Bandar Lampung dengan KPBU, Semarang Barat dengan KPBU. SPAM untuk PON 2020 Jayapura, SPAM Durolis di Riau, SPAM regional Burana Umbulan di Jawa Timur.

Dan untuk penyehatan lingkungan permukiman sebesar 1,7 triliun. Pertama untuk pembangunan sistem pengelolaan air limbah yang melayani 167.680 KK di IPLT Wakatobi, Pipa Air Limbah Kota Makassar, optimalisasi jaringan pipa air limbah Medan, pembangunan pipa air limbah di kota Pekanbaru, di PAL Kota Palembang, dan lain-lainnya.

Kemudian pembangunan sistem penanganan persampahan untuk 215.500 KK, yaitu TPA Regional Mamitarang, revitalisasi TPA Suwung di Bali, TPA di Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Jombang, Kota Malang, Kota Jambi, TPST skala kawasan di Bandar Lampung.

Untuk dukungan manajemen dialokasikan 471 miliar. Prasarana pendidikan seperti yang tadi kami sampaikan adalah 6,5 miliar untuk rehabilitasi sekolah rusak, penyelesaian pembangunan kampus, rehabilitasi madrasah, dan 9 perguruan tinggi agama.

Untuk pintu lintas batas negara akan di bangun di 8 PLBN seluas 73.195 meter persegi, yaitu di PLBN Jagoi, Entikong, Seipancang, Longmidang, Motamasin, Skouw, Sota, dan Yetekeun.

Di bidang perumahan. Pembangunan perumahan swadaya 4,1 triliun, pembangunan PSU rumah umum 124 miliar, pembangunan rumah khusus 680 miliar, dan pembangunan rumah susun 2,6 triliun. Untuk rumah swadaya di bangun baru 8.000 unit, dan peningkatan kualitas 192 ribu unit.

Untuk rumah susun akan di bangun rumah susun 7.512 unit, antara lain untuk ASN di Kabupaten Oku Timur satu *tower*, MDR pemerintah kota Mojokerto satu *tower*, dan atlit pon 2020 Papua satu *tower*.

Kemudian pembangunan rumah khusus 3.230 unit untuk masyarakat adat kampung Randawayan Distrik Ampimoi, kurban bencana di Kubalihe Yahukimo Papua, perbatasan di Kecamatan Wasile Halmahera Timur Maluku Utara. Total anggarannya adalah 7,8 triliun.

**Bapak Pimpinan, Ibu/Bapak Anggota Komisi V DPR RI yang kami hormati,**

Dukungan pelaksanaan program tahun 2019 untuk Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Balitbang, BPSDM, BPIW, dan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi melalui perencanaan dan pengawasan.

Satu, perencanaan *master plan*, antara lain *master plan* destinasi pariwisata Danau Toba, Mandalika, Labuan Bajo, Borobudur, dan lain-lain. Dan penguatan sistem pengendalian intern pemerintah sesuai dengan Menteri PUPR Nomor 20/2018 tentang penyelenggaraan SPIP di Kementerian PUPR. Program kerja pengawasan tahunan *me-review* RKAKL 1.200 satuan kerja. Melakukan audit kinerja 400 satuan kerja. Tindak lanjut LHP dan sosialisasi serta reevaluasi aset 278 ribu NP di tahun 2019 dengan total anggaran 2,3 triliun.

Untuk pengembangan inovasi teknologi, teknologi terapan, rekomendasi iptek, serta layanan teknik dan alih teknologi, antara lain Ruspim, Rika, Risa, Bendung Modular, dan lain-lain.

Penguatan SDM. Pelatihan ASN untuk 8.000 ASN, pengelolaan kinerja, pemetaan karir ASN untuk 22.000 ASN, dan pengembangan jabatan fungsional. Pelatihan dan sertifikasi tenaga konstruksi dan penguatan SDM untuk 212.000 tenaga kerja. Sedangkan tata kelola administrasi pegawai *smart ASN e-government*, pengembangan sistem informasi kepegawaian ASN.

Demikian, Bapak Pimpinan, Ibu/Bapak Anggota Komisi V DPR RI yang kami hormati, rancangan garis besar tentang RKAKL tahun 2019 yang akan dijabarkan dalam format yang sudah diarahkan oleh Bapak untuk pembahasan RDP dengan eselon satu nanti.

Terima kasih.

***Assalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.***

**KETUA RAPAT:**

***Wa'alaikumsalaam.***

Terima kasih Pak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

**Pimpinan dan para Anggota Komisi V DPR RI,**

Saya kira dari catatan yang tadi kita sudah sampaikan berkaitan dengan format presentasi dari para eselon satu Pak Menteri sudah memberikan arahan untuk menggunakan format yang lebih detail, sehingga nanti kita bisa sinkronisasikan dengan beberapa usulan program-program dari anggota. Akan kelihatan di program-program yang sudah disampaikan nanti. Formatnya lebih detail. Kita tidak bahas satuan tiga, tapi sudah kita tahu kegiatannya dimana dan juga anggarannya berapa.

Yang kedua, Pak Menteri sendiri tadi menyampaikan program-program yang berkaitan langsung dengan masyarakat itu sudah ada penambahan-penambahan, baik itu berkait dengan P3TGAI, itu juga berkaitan dengan PISO perumahan, dan jembatan gantung. Itu nanti kita dengarkan, paling tidak ada tambahan dari pembahasan kita yang lalu.

Ada tambahan?

**MENTERI PUPR:**

Kami tambahkan, mohon maaf Pak.

Kalau jembatan gantung tahun ini ada ada 130. Mungkin tahun depan lagi akan kita tambah lagi.

**KETUA RAPAT:**

Jadi itu lagi sudah ditegaskan oleh Pak Menteri. Termasuk juga apresiasi dan juga target-target SDA yang masih belum tercapai, dan kita minta itu ada penambahan anggaran. Dan juga tadi sudah kurang lebih sekitar 800-an, ada penambahan 800-an miliar untuk SDA.

Dan itu saya kira catatan-catatan kita yang kita ingin sampaikan. Tentu sepakati kesepakatan ini nanti pada saat dengan para eselon satu kita akan membahas dan kita kawal bersama. Mungkin untuk *partner* kita kali ini kalau memang masih ada yang ingin disampaikan saya beri kesempatan. Tapi

kalau ada yang mau menyampaikan secara tertulis juga saya beri kesempatan.

Jadi catatan yang ingin kita sampaikan kepada Pak Menteri kebijakan-kebijakan yang empat tadi itu sudah kita sampaikan, dan Pak Menteri sudah merespon secara baik. Untuk itu maka saya tetap beri kesempatan kepada anggota kalau bisa kita bisa lebih cepat, jam empat sudah bisa selesai ini kalau begitu.

Bisa ya kita setuju ya? Panjang-panjang nanti kita ulang lagi dengan para eselon satu. Setuju ya? Nanti dengan para dirjen saja ya. Kita setuju itu ya? Kalau setuju saya ketok dulu. Tapi kalau ada anggota yang mau ngomong saya kasih paling lambat 3 menit. Setuju ya?

### **(RAPAT : SETUJU)**

Pak Ini interupsi dulu, interupsi ya. Tiga menit-tiga menit ya. Habis ini Pak Rendy berdasarkan absen.

Silakan.

### **F-PAN (H. SUNGKONO):**

Terima kasih Ketua.

**Yang kami hormati, Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi yang kami hormati,**

**Pak Menteri dan jajarannya,  
Ibu Sekjen, Pak Dirjen, semuanya.**

Saya cuma menanyakan program di penyediaan perumahan, disinikan ada pembangunan rumah susun. Saya melihat setiap tahun kan kita membuat rumah untuk asrama murid, ini termasuk rumah susun apa tidak? Saya mohon itu diberikan gambaran, saya belum melihatnya.

Saya waktu berkunjung ke Kalimantan Timur kemarin, ada satu masyarakat, dan termasuk pejabat di sekitar itu, yang menyampaikan di satu kota, nama kotanya itu Kalimantan Timur, barangkali ini perlu, karena ini daerah perbatasan antara Kabupaten Kutai Barat-Mahakam Hulu, itu salah satu kota baru atau kabupaten baru yang belum ada jalan sama sekali, dan itu juga daerah perbatasan. Barangkali ini bisa bagian untuk skala prioritas pembangunan nasional kita.

Dan yang terakhir, saya mohon, karena pemerintah hari ini lagi membuat kreatif pembiayaan berupa KPBU dan yang lainnya, saya mohon analisa perhitungannya pada posisi yang harus tidak menguntungkan pemberi biaya atau yang membiayai, karena hitung-hitungannya harusnya mendekati seperti komersial bisnis. Jangan terkesan kita malah tercekik karena pembiayaan yang menggunakan inovasi baru yang sekarang ada KPBU dan sejenisnya.

Barangkali itu saja, terima kasih.

***Wassalaamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokaatuh.***

**KETUA RAPAT:**

***Wa'alaikumsalaam.***

Terima kasih

Pak Sungkono saya sudah coret Pak. Ini Bapak bukan interupsi, Bapak bertanya itu. Ini namanya Pimpinan kecolongan. Jadi saya coret ini, Bapak sudah tidak lagi kesempatan.

Pak Rendy.

**F-PDIP (IR. RENDY M. AFFANDY LAMADJIDO, M.M., M.B.A):**

Terima kasih Pimpinan.

**Yang saya hormati, Bapak Menteri dan seluruh jajarannya.**

***Assalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.***  
**Salam sejahtera buat kita sekalian, selamat siang.**

Langsung saja, Pak Menteri.

Saya kira ini sekarang tahun-tahun terakhir dalam rangka kita menyemarakkan dan mensosialisasikan program-program pemerintah. Saya berharap bahwa anggaran ke depan itu sudah masuk dalam lingkup dari program-program jangka pendek, menengah, dan panjang dari pemerintah. Termasuk juga dalam persoalan program nawacita.

Ada tiga program pemerintah yang sangat mendasar di dalam nawacita itu yang kita tahu. Yang pertama adalah membuka keterisolasian, yang kedua adalah membangun pangan (swasembada pangan), yang ketiga adalah seperti kita tahu bahwa pemerintah dengan nawacitanya itu membuat program yang namanya revolusi mental. Tentunya ketiga faktor ini sangat mendominasi program-program pembangunan di akhir-akhir masa jabatan ini.

Saya kira yang pertama saya ke Bina Marga, saya memberikan apresiasi sudah dilaksanakan secara bagus. Tinggal barangkali di sumber daya air yang kita tahu bahwa ini adalah penunjang pangan.

Yang ketiga adalah masalah revolusi mental. Saya kira revolusi mental ini saya berharap pemerintah juga memperhatikan masyarakat konstruksi, khususnya di bawah Dirjen Bina Konstruksi. Yang perlu di bantu adalah bagaimana anggaran yang hanya sekitar 558 miliar ini bisa di tambah, karena ini menyangkut masalah pembinaan sumber daya manusia di lapangan, yaitu masyarakat konstruksi. Saya yang sudah 8 tahun menjadi Ketua Umum Masyarakat Konstruksi yang membawahi kurang lebih 800 ribu lebih kontraktor Indonesia memang masih menyangkan peranan pemerintah disini untuk lebih banyak mendominasi terhadap pelatihan-pelatihan, terutama buruh-buruh dan mandor. Sehingga dengan 558 miliar ini saya minta ini di tambah, supaya Dirjen Bina Konstruksi ini bisa berperan lebih aktif.

Memang kemarin terus terang saja, Pak Menteri, saya agak sedikit emosi, karena kemarin itu program-program ini tidak menyentuh. Tapi *alhamdulillah* saya sudah berbicara dengan Pak Dirjen, saya berharap Pak Dirjen Bina Konstruksi ini ke depan itu membina langsung kepada masyarakat, terutama kepada pekerja-pekerja yang namanya mandor.

Karena kita tahu bahwa kemarin itu ada kurang lebih 14 kecelakaan kerja itu diakibatkan karena kelalaian. Ini yang kita ciptakan ke depan. Sehingga saya berharap pengalaman saya sebagai Ketua Umum Masyarakat Konstruksi yang membawahi kurang lebih 800 yang sekarang sudah menyusut hampir 300 lebih kontraktor Indonesia itu saya berharap itu bisa kita jenjangkan lagi, bisa kita menambah. Karena pemerintah dengan anggaran yang cukup banyak bisa membutuhkan kontraktor yang juga cukup banyak.

Saya kira itu saja, Pak Ketua, harapan saya, sehingga saya berharap sekali dalam memberikan anggaran ke depan ini harus masuk di dalam koridor-koridor yang di maksud oleh pemerintah, yaitu terutama dengan nawacitanya.

Saya kira itu saja, Pak Ketua.

***Wabillaahitaufiq Wal Hidaayah  
Wassalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.***

**KETUA RAPAT:**

***Wa'alaikumsalaam.***

Terima kasih.

Pak Rendy ini biasanya panjang, jadi sesuai dengan kesepakatan 3 menit. Walaupun lebih sedikit tidak apa-apa ke Pak Rendy. Yang lain nanti saya ingatkan kalau lebih dari tiga menit.

**F-PKS (IR. H. SIGIT SOSIANTOMO):**

Saya interupsi Pak, bukan bertanya.

**Pak Pimpinan, Pak Menteri, yang saya hormati.**

Saya tadi ingin potong Pimpinan yang memberikan apresiasi kepada Pak Menteri karena program ISO bertambah. Tapi setelah saya ingat-ingat tidak bertambah. Tahun 2018 ISO itu 900 lokasi. Tadinya 500, kami di rapat DPR dengan Komisi V minta tambah, kemudian Pak Menteri menambah menjadi 900 lokasi. Sekarang tambahan Cipta Karya ini meningkat, tambahan anggaran, tetapi PISO nya cuma 600. Sebagaimana tahun lalu kami minta untuk di tambah lagi.

Terus satu lagi, bagaimana agar ISO itupun bisa masuk ke kota. Karena di antara kami juga memiliki dapil-dapil kota. Belum-belum saya sudah di apresiasi teman-teman.

Satu lagi, Pak Menteri belum menceritakan kepada kami, beberapa waktu yang lalu selalu kita apresiasi Pak Menteri karena mendukung rencana undang-undang inisiatif DPR. Ada Undang-Undang Jaskon, ada Undang-Undang Arsitek, dan sekarang Undang-Undang SDA. Tapi kami mohon ada alokasi penguatan SDM itu untuk Permen dan PP nya, dan kami tidak melihat laporan disini. Kami ingin tahu sampai dimana undang-undang itu. Jangan-jangan kami membuat Undang-Undang Jaskon sampai sekarang belum ada implementasinya. Kami buat Undang-Undang Arsitek sampai sekarang belum

ada implementasinya. Sementara kita sudah masuk di Undang-Undang Sumber Daya Air.

Begitu, Pak Menteri, Ketua, saya kira itu interupsi saya.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak.

Interupsi untuk PISO tadi Pak Menteri sudah angguk kepala mau tambah Pak. Nanti kita dengar penambahannya berapa di eselon satu nanti.

Silakan Pak Subarna. Siap-siap Pak Ridwan Bae. Tetap 3 menit ya. Jadi sebenarnya pesan yang kita sampaikan kita sudah berikan.

**F-GERINDRA (H. SUBARNA, S.E., M.Si):**

*Bismillaahirrohmaanirrohiim.*

*Assalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.*

Terima kasih Pimpinan.

**Yang saya hormati, Pak Menteri beserta jajaran.**

Saya ingin mengingatkan yang pertama tentang anggaran yang proporsional, tetap mengacu kepada jumlah penduduk. Kami ingatkan ini tentang jumlah penduduk Pak. Jawa Barat jumlah penduduk paling banyak. Kita tidak hanya berbicara tentang pemerataan. Yang kedua tentang wilayah. Yang ketiga tentang kompensasi.

Terus terang saja berbicara tentang kompensasi, mohon maaf, jumlah penduduk kita terlampaui banyak. Saya mencontohkan antara Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kalau berbicara DAU/DAK beda 10 kabupaten. Kalau kita hitung 2 triliun artinya sudah beda 20 triliun. Untuk itu kepada Menteri PUPR tolong ini diperhatikan. Karena terus terang saja di Jawa Barat ini banyak sekali daerah-daerah tertinggal. Kita lihat banyak sekali, khususnya di Jawa Barat bagian selatan viral sekali, kemarin di desa tertentu itu ada anak yang naik ojek begitu banyak. Untuk itu kompensasi dari berbagai kebijakan. Karena tadi anggaran untuk DAU/DAK kelihatannya diarahkan berbeda, tolong untuk PUPR ini diperhatikan untuk Jawa Barat.

Selanjutnya saya mengapresiasi tentang program kerakyatan. Untuk itu kompensasinya kami meminta untuk Jawa Barat di program kerakyatan diperbanyak.

Terima kasih.

*Wassalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih.

Pak Ridwan. Siap-siap Yoseph.



**F-PG (IR. RIDWAN BAE):**

Terima kasih.

**Yang terhormat, Pimpinan dan Anggota Komisi V yang terhormat,  
Pak Menteri dan seluruh jajarannya,  
Pak Sekjen, para Dirjen.**

Cuma dua hal saja yang saya ingin sampaikan.

Yang pertama, kalau bisa penganggaran terhadap proyek-proyek lanjutan itu dilanjutkan Pak. Karena ada yang tidak selesai. Seperti misalnya Talud Wanggu-Kendari, itu kan masih banjir habis Pak. Karena Bapak sudah anggarkan 47 miliar tahun kemarin. Itu contoh saja. Kemudian dan sebagian status jalan dari provinsi ke nasional. Karena provinsi sepertinya sudah tidak sanggup membiayai, akhirnya masyarakat begitu sukar Pak.

Yang kedua, Bapak juga sudah mencanangkan 65 bendungan di seluruh Indonesia. Dari 65 bendungan itu kan tidak semuanya mungkin berhasil. Saya curiga bisa ada 10 atau 15 barangkali akan gagal oleh karena apakah itu ganti rugi tanah atau apa misalnya disitu masalahnya. Di Sulawesi Tenggara satu lagi Pak yang kurang lebih anggaran 2,5 T disitu barangkali. Di Ameroro Pak, namanya adalah bendungan Ameroro Kabupaten Konawe. Itu lahan tidak perlu dibebaskan. Itu adalah lahan pemerintah murni.

Itu saja sebagai masukan. Keputusan ada di Pak Menteri sendiri.

Terima kasih Pak.

**KETUA RAPAT:**

Pak Menteri, terima kasih.

Ini Pak Ridwan Bae ini paling sering kasih usulan ini. Itu tolong diperhatikan betul itu. Kalau tidak, nanti jadi sasaran para eselon satu nanti. Itu usulan dari daerah mungkin Pak.

Pak Yoseph Umar Hadi. Siap-siap Pak Saat.

**F-PDIP (DRS. YOSEPH UMAR HADI, M.Si):**

Saya tidak bertanya, tetapi menyampaikan apresiasi pada Pemerintah yang sangat kooperatif dan sangat mem-*backup* kita untuk 2019 dalam rangka program kerakyatan dan program yang menyentuh langsung pada persoalan-persoalan yang terkait dengan kesejahteraan rakyat, maka ini saya kira perlu kita dukung. Termasuk barangkali mungkin Pak Menteri apakah kita ikut bisa menyampaikan usulan untuk pembangunan sekolah-sekolah tadi. Apakah itu semuanya program dari Pemerintah atau dari pihak kita bisa menyampaikan juga usulan-usulan itu. Ini sebagai pertanyaan saja. Nanti kalau memang tidak bisa kita tidak apa-apa. Tapi kalau ada peluang itu kita bisa menyampaikan masukan-masukan terkait dengan pembangunan pendidikan.

Yang kedua, saya mencermati pola kebijakan untuk sumber daya air, dimana nampaknya prioritas pengalokasian anggaran kepada ketersediaan

air baku, terutama pembangunan embung dan waduk, lalu yang kedua adalah irigasi, dan ketiga kemudian OP, dan keempat sungai dan pantai.

Sedikit saya ingin menyampaikan pertanyaan dan masukan. Kebijakan ini kita dukung lah, artinya memang produktifitas untuk stok pangan beras memang penting dalam rangka ketersediaan air baku. Tetapi tentu kita juga tidak boleh melupakan bagaimana kondisi sungai dan pantai kita yang memang mengalami degradasi yang cukup parah. Apalagi pantai-pantai ini terkait dengan masyarakat dan aset mereka, maupun juga nelayan. Oleh karena itu tentu kebijakan yang menempatkan prioritas anggaran nomor 4 untuk sungai dan pantai ini saya kira perlu kita lihat secara kasuistik, secara tidak merata, tetapi mohon nanti kalau ada masukan-masukan yang terkait dengan sungai dan pantai juga mendapatkan perhatian. Karena kita tidak hanya mem-*backup* petani juga, tetapi kita mem-*backup* rakyat dan nelayan.

Saya rasa itu saja, Pak Ketua. Jadi saya mohon pola kebijakan yang sifatnya menempatkan sungai dan pantai ini sebagai urutan keempat ini mohon bisa dipikirkan kembali secara merata.

Terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih.

Ini luar biasa Pak Yoseph ini kurang dari 3 menit. Tapi pertanyaannya substansi, itu yang berkaitan dengan perbaikan-perbaikan sekolah itu bisa tidak kita usulkan, itu intinya. Yang lain-lain saya kira program SDA itu bisa menjadi perhatian.

Terima kasih Pak Yoseph.

Pak Saat Silaban. Siap-siap Pak Gatot Sudjito.

#### **F-NASDEM (SAAT SILABAN):**

Terima kasih Pimpinan.

Horas.

**Yang saya hormati Pimpinan.**

**Yang saya hormati teman sesama Anggota Komisi V.**

**Yang saya hormati Bapak Menteri beserta jajaran.**

Mungkin ini singkat saja, Pak Menteri.

Untuk secara umum pembangunan jalan di dapil saya bisa dinyatakan jalan. Hanya saja ada dua titik yang sangat mengganggu aktifitas beberapa provinsi dan kabupaten, dan juga ada salah satu di pulau.

Salah satu contoh, waktu itu kami pernah kunjungan spesifik ke Nias. Yang seharusnya dilalui dengan jalan normal kira-kira satu jam setengah, tapi kami jalan empat setengah jam, karena rusaknya jalan disana. Memang jalan ini jalan provinsi. Ini sudah terjadi dari sejak tsunami katanya Pak yang tahun 2004. Keluhan mereka lima kabupaten itu sebenarnya ada usulan ke pihak pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat, supaya itu di angkat status jalannya menjadi jalan nasional, karena menghubungkan lima kabupaten.

Tapi bukan jalan lingkaran. Kalau disini saya lihat ada juga program Pemerintah jalan lingkaran Nias. Kalau ini sebenarnya jalan di tengah ini untuk menghubungkan lima kabupaten/kota itu juga. Jadi saya kira tujuannya sama, hanya di luar dan di dalam saja.

Yang kedua, ada jalan sampai sekarang, itu sudah kita sampaikan beberapa kali, antara Tapanuli Utara dengan Tapanuli Selatan. Sampai sekarang pun ada disiapkan disana alat tiga unit spesialis untuk menarik mobil-mobil yang terpuruk. Sementara jalan menuju itu sudah sangat bagus, dan setelah itu kesana bagus sekali. Untuk itu saya kira untuk teknik kita tidak perlu lagi kasih tahu. Tapi yang jelas Kementerian PUPR dalam hal ini siap dan mampu untuk bikin akal tentang hal itu. Harapan masyarakat disana kalau itu bisa lancar mungkin perekonomian mereka juga lancar.

Dan yang ketiga barangkali, Pak Menteri, kita waktu itu sama-sama meninjau terowongan di Sibolga. Itu juga sangat diharapkan masyarakat kalau bisa jalan alternatifnya itu jadi, jarena melihat juga jalan yang tadi ini sangat memprihatinkan.

Barangkali itu saja kalau tentang dapil, Pak Menteri. Tapi kebetulan ini program ke depan karena kebetulan saya tinggal di Tangerang Selatan ini sudah 32 tahun khusus di Tangerang Selatan. Sebelum Tangerang Selatan pun juga kita sudah disana. Kalau saya lihat sangat prihatin juga melihat kehidupan masyarakat disana, khususnya masyarakat asli yang disana yang sebelumnya mereka bertani barangkali tapi bergeser ke arah perdagangan dan tidak mampu, akhirnya ekonomi sangat memprihatinkan. Banyak saya pikir yang kita bangun.

Apa yang disampaikan Pak Ketua tadi ada pergeseran anggaran dari direktorat mana umpamanya ke sumber daya air. Karena disana banyak setu, mungkin kita bangun itu ke depan menjadi satu kehidupan masyarakat disana dagang. Atau nanti cara lain di buat oleh pariwisata.

Maaf, kemarin juga waktu rapat dengan Kementerian Ekonomi saya sampaikan desa tertinggal, disana itu masih banyak buta huruf. Tadinya bertani akhirnya berdagang, pekerja tukang, tidak mampu barangkali disana akhirnya ekonominya sangat memprihatinkan. Jadi disana banyak setu, Setu Gintung, macam-macam itu. Saya kira kalau itu kita bangun untuk tempat pariwisata mungkin mengangkat perekonomian mereka.

Saya kira itu saja usul saya, Pak Menteri.

Terima kasih Pak Ketua.

#### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih.

Pak Menteri, Pak Saat ini pindah dapil Pak, dari Sumatera Utara ke Banten. Jadi sudah ada wakil Banten, jadi Bapak tolong perhatikan Banten III.

Pak Gatot. Siap-siap Pak Aboe Bakar. Pak Gatot ini harus juga di kasih ingat tiga menit Pak.

**F-PG (DRS. H. GATOT SUDJITO, M.Si):**

***Assalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.***

**Pimpinan/Anggota Komisi V yang sangat kami hormati.  
Pak Menteri dengan seluruh jajarannya.**

Pak Dirjen yang baru Dirjen Jalan dan Jembatan itu yang mana? Namanya siapa Pak? Saya memberikan apresiasi. Bukan karena saya adalah partai pendukung pemerintah, tetapi selama ini kemitraan kita yang barangkali yang agak tegas, jelas, dan manfaat, berkah, dan barokah itu hanya PUPR. Andaikata Komisi V nanti manfaatnya itu akhirnya dipercaya kembali oleh rakyat dan duduk kembali, ini juga jangan lupa ini juga jasanya Pak Menteri. Ini tema sentralnya itu Pak.

Oleh karena itu yang pertama adalah berkaitan dengan agenda BSPSP3TGAI yang disampaikan PISO, jembatan gantung, bahkan yang disampaikan dua sahabat senior saya yaitu adalah Pak Yoseph sama Pak Rendy itu adalah betul-betul manfaatnya bagus.

Cuma yang menjadi kendala itu adalah hari ini untuk BSPS itu jatahnya ini kelihatannya malah justru menurun. Ini yang menjadi catatan kemarin, karena catatannya adalah 1.990 kemarin, tapi hari ini di minta hanya 1.000, berarti ada penurunan yang perlu di bahas di eselon satu. Tetapi Pak Menteri memberikan sinyal-sinyal, selama itu untuk kepentingan rakyat silakan. Kelihatannya Pak Menteri *goodwill* politiknya begitu, komitmennya begitu.

Yang terakhir adalah urusan berkaitan dengan dapil saya. Dapil saya itu adalah kemarin keputusan dari hasil kunjungan kerja Komisi V terjadi itu adalah, dan menurut informasi Pak Bupati, Pak Bupati sudah mengajak Pak Menteri terkait dengan urusan akses ke pelabuhan/jalan ke pelabuhan, yaitu Pelabuhan Nggelon. Dan investasi dari APBN sudah tertanam disitu adalah 29,1 sekian miliar. Oleh karena itu program itu tidak boleh dihentikan, karena itu menjadi potret daripada persoalan yang tidak baik, karena pemerintah maupun rakyat itu membutuhkan itu. Apalagi Cilacap itu adalah sudah terbangun yang namanya pelabuhan niaga, dan itu adalah perintis, sehingga untuk tol laut itu adalah menjadi program Pak Jokowi adalah sangat menunjang, dan itu adalah mengondkrak urusan selatan-selatan, mengimbangi wilayah utara, Jawa Utara. Oleh karena itu, Pak Menteri, sangat diharapkan, karena masyarakat disana sangat mengharapkan proyek itu. Dan itu berkaitan dengan yang di tunggu-tunggu, tidak hanya Pacitan, tetapi bermanfaat untuk Jawa Tengah, Jogja, dan Jawa Timur.

Terus kemudian yang selanjutnya adalah, ada program jalan yang sudah di survei balai, dan ini perlu diskresi. Tetapi kebijakan persoalan diskresi ada di Pak Menteri, oleh karena itu program selanjutnya saya akan serahkan langsung.

Mohon ijin, Pak Pimpinan, saya menyerahkan program ini. Mudah-mudahan apa yang diharapkan/diinginkan oleh masyarakat, khususnya adalah kawan-kawan Komisi V terkait dengan program yang itu adalah untuk kepentingan masyarakat langsung, dan itu berkaitan dengan manfaatnya

untuk tahun politik, mudah-mudahan Pak Menteri memberikan *support* yang tidak tanggung-tanggung, total.  
Terima kasih.

***Wassalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.***

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak Gatot.

Pak Gatot ini sebut-sebut partai pendukung. Itu kita punya calon presiden itu sudah berpelukan di arena pencak silat padepokan yang Kementerian PUPR itu rehab disana. Terima kasih Pak Menteri sudah rehab itu pendoponya, dan kemudian memberikan emas yang paling banyak. Dan disitu terjadi pelukan antara calon presiden kita.

Pak Aboe Bakar. Siap-siap Pak Bahrum Daido.

**F-PP (DRS. H. ABUBAKAR WASAHUA, S.H., M.H):**

***Assalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.***

**Pimpinan dan segenap Anggota DPR Komisi V yang saya hormati.  
Bapak Menteri beserta seluruh jajarannya yang saya hormati.**

Saya langsung saja.

Saya sesungguhnya sangat sependapat jika ada pemikiran bahwa seluruh program yang dicanangkan oleh kementerian itu senantiasa memiliki sentuhan dengan masyarakat. Itu yang pertama.

Yang kedua, berkaitan dengan soal bendungan saya kemudian mengingat beberapa penjelasan dari Presiden Jokowi, presiden kita, bahwa di Indonesia ini kita masih mengalami kekurangan bendungan/waduk dibandingkan dengan negara-negara lain, sekitar kurang lebih dua ratusan. Indonesia saat ini memiliki bendungan itu. Dan menurut hitung-hitungan Pak Jokowi jumlah ini tidak berbanding lurus dengan bentangan pulau, potensi alam Indonesia yang sedemikian potensial.

Oleh karena itu berkaitan dengan soal bendungan atau waduk itu perlu mendapat perhatian tersendiri. Dan berkaitan dengan hal ini juga saya ingin menyampaikan kepada Bapak Menteri bahwa di Sulawesi Selatan ada sebuah waduk tunda yang saat ini belum fungsional. Waduk itu terletak di sekitar Kota Makassar. Mungkin pertanyaannya, kenapa sampai saat ini waduk itu belum fungsional. Jawabannya Pak Menteri waduk ini sampai hari ini belum terselesaikan pembayaran tanahnya, masih ada tanah yang ada di sekitar waduk yang belum tuntas pembayarannya. Oleh karena itu saat ini Walikota Makassar sedang bersurat kepada Pak Menteri meminta kearifan Pak Menteri untuk menyelesaikan persoalan waduk itu sehingga kita berhadap waduk ini dalam waktu yang tidak teralu lama bisa fungsional.

Selanjutnya berkaitan dengan dapil saya. Yang pertama adalah soal jembatan gantung. Di dapil saya terdapat beberapa jembatan gantung yang parah, bahkan terputus, akibat di terjang oleh banjir. Dari sekian jembatan gantung itu di kesempatan ini saya berharap/saya bermohon kepada Pak

Menteri mudah-mudahan bisa mendapat perhatian, bisa mengantisipasi jembatan gantung yang sedang mengalami keterputusan, mengalami kondisi yang parah.

Yang kedua, perlu saya sampaikan juga kepada Pak Menteri bahwa poros jalan yang menghubungkan Sulawesi Selatan dengan Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, itu sedang dalam kondisi yang cukup memprihatinkan, utamanya dari luas poros jalan di maksud. Oleh karena itu ke depan saya berharap adanya perhatian Pemerintah/Pak Menteri untuk mengantisipasi jalan nasional ini untuk kemudian dapat memberikan kemudahan transportasi jalur darat, utamanya dari Sulawesi Tengah menuju Sulawesi Selatan.

Saya kira ini beberapa hal yang dapat saya sampaikan kepada Pak Menteri, terima kasih.

***Wassalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.***

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih.  
Pak Bahrum Daido. Siap-siap Ibu Neng Eem

**F-PD (DR. IR. BHRUM DAIDO, M.Si):**

Terima kasih Pimpinan.

**Yang saya hormati, Bapak Menteri, para Dirjen, beserta seluruh jajarannya.**

**Yang saya hormati, Ketua/Pimpinan dan segenap Anggota Komisi V.**

Ada dua hal yang saya akan tanyakan kepada Pak Menteri.

Pertama, sebenarnya tadi saya mau interupsi Pak Menteri. Tapi saya melihat sudah ada Pimpinan yang interupsi. Masalah skema pembiayaan, Pak Menteri. Jadi setelah kemarin kami raker bersama Menteri PDT, yang mana kemarin itu ada salah satu renstra dari Menteri PDT yaitu masalah keluar dari ketertinggalan daripada 5.000 desa yang akan keluar dari daerah desa tertinggal, yang mana pada waktu itu dikatakan bahwa untuk Menteri PDT sendiri untuk menyelesaikan hal ini tidak mungkin, karena anggaran dari PDT itu untuk tahun 2019 hanya sekitar 4 triliun lebih.

Katanya untuk menyelesaikan daripada ketertinggalan desa ini ada keputusan bersama lintas kementerian dalam rangka mengembangkan desa tertinggal yang di format dalam kawasan pedesaan prioritas nasional, yang mana di dalam keputusan bersama itu ada lima kawasan KPPN (Kawasan Pedesaan Prioritas Nasional). KPPN pertama yaitu KPPN Kabupaten Dompu, KPPN kedua itu KPPN Tanjung Kabupaten Berau, kemudian KPPN ketiga

KPPN Towoti Kabupaten Luwuk Timur, kemudian yang keempat KPPN Morowali Kabupaten Morowali, yang kelima KPPN Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang. Pada saat ini saya melihat tidak ada implementasi/tidak ada komitmen dari menteri.

Maksud daripada tujuan daripada keputusan ini adalah adanya kerjasama antar kementerian dalam rangka menyelesaikan satu kawasan pedesaan prioritas nasional. Sekarang sudah tahun kelima rentra, 2019 tahun kelima, berarti tahun kelima harus ada partisipasi daripada Kementerian PUPR dalam rangka menganggarkan daripada KPPN ini.

Barangkali pada kesempatan ini kami meminta tanggapan Pak Menteri masalah KPPN ini yang menjadi keputusan bersama dalam rangka menyelesaikan kawasan pedesaan prioritas nasional, kami minta penjelasan Pak Menteri.

Kemudian yang kedua, di daerah kami akan dilakukan pembangunan bendung, yaitu bendung Sungai Rongkong. Itu di taksir akan mengairi sawah kurang lebih 100 ribu hektar. Sekarang dalam proses desain, yang mana di dalam proses desain itu Kementerian PU akan menempatkan satu titik bendung di dalam desan itu. Kemarin kami dialog bersama program perencanaan, akan menempatkan satu titik bendung yang akan menenggelamkan satu desa dengan banyaknya penduduk 1.888 jiwa, yang mana daripada akibat dari penempatan titik itu semua warga desa menolak dan melakukan demonstrasi besar-besaran di wilayah Kabupaten Luwuk Utara, yaitu tempat penetapan titik bendung, dimana titik bendung itu kurang lebih 60 meter tingginya. Dan di dalam mercu bendung 60 meter itu tidak ada semacam kegiatan PLTA. Jadi ini fokus Kementerian Pekerjaan Umum tidak ada intervensi daripada Kementerian Pertambangan dan Energi. Untuk itu kepada Pak Menteri, penempatan titik bendung pada sungai Rongkong itu yang di desa Tandung mohon di tinjau ulang, karena terjadi status politik yang kurang kondusif disana. Untuk itu kami diberi amanat dari masyarakat untuk menyampaikan kepada Pak Menteri tentang penolakan titik bendung itu yang akan mengairi kurang lebih 100 ribu hektar yang ada disana, dan ada alternatif dua dan tiga untuk penetapan titik bendung itu.

Demikianlah penyampaian saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf.

***Assalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.***

Pimpinan, saya akan sampaikan kepada Pak Menteri tentang amanat masyarakat dalam rangka penolakan titik bendung yang menenggelamkan satu desa yang ada disana.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak Bahrum.

Berikutnya Ibu Neng Eem. Siap-siap Pak Bakri, kemudian Pak Johny Allen.

**F-KB (NENG EEM MARHAMAH ZULFA HIZ, S.Th.I):**

***Assalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.***  
**Salam sejahtera buat kita semuanya.**  
**Om Swastiastu.**

**Pimpinan Komisi V yang saya hormati dan saya banggakan.**  
**Bapak Menteri PUPR beserta jajaran yang saya hormati dan saya banggakan.**  
**Juga kawan-kawan semua Anggota Komisi V.**

Pertama-tama saya ingin menyampaikan apresiasi saya terhadap Kementerian PUPR, karena kemarin juga PUPR ikut berpartisipasi dalam rangka menyukseskan Asian Games. *Alhamdulillah* tadi juga Bapak Ketua senang karena disitu terjadi hal yang diinginkan oleh seluruh warga negara Indonesia yaitu bagaimana Pak Jokowi dengan Pak Prabowo berpelukan. Itu sebenarnya luar biasa, ini akan memberikan energi positif untuk masyarakat di bawah.

Untuk selanjutnya, Bapak Menteri yang saya hormati, saya ingin menyampaikan bahwa kalau melihat postur anggaran yang telah disampaikan disini memang Dirjen Bina Marga termasuk yang tertinggi, terus kemudian SDA, dan selanjutnya. Dan tadi juga sudah disampaikan bahwa yang Bina Konstruksi itu juga memang amat sangat minim.

Saya ingin menyampaikan bahwa, kalau misalkan kita akan banyak kegiatan di bidang konstruksi maka tentu saja harus diimbangi agar Bina Konstruksinya itu juga harus diperkuat. Karena apa, kita tidak ingin hal-hal yang kemarin terjadi banyak kecelakaan kerja ketika kegiatan-kegiatan konstruksi. Itu mohon jadi pertimbangan awal.

Terus kemudian untuk selanjutnya terkait penyediaan perumahan. Karena kebutuhan papan ini adalah kebutuhan dasar manusia, saya kira saya juga sangat mengapresiasi dengan kerja-kerja penyediaan perumahan yang kemudian telah memberikan program-program yang amat sangat populis. Terus kemudian juga ketika terjadi bencana Lombok itu juga dengan sigap juga Pak Menteri beserta jajaran juga merespon dengan cepat, saya juga apresiasi. Dan untuk ke depan juga mungkin bisa lebih ditingkatkan untuk terutama di daerah-daerah pemilihan kami semua.

Terus kemudian untuk selanjutnya terkait SDA. Di bulan-bulan ini, bahkan beberapa bulan kemarin, ini memang beberapa daerah terjadi kekeringan. Bahkan PDAM pun sudah tidak mampu mendistribusikan air di beberapa daerah. Apalagi di daerah-daerah yang perkampungan dan pedesaan atau pegunungan. Kalau di perkotaan biasanya masih ada air walaupun itu sedikit. Banyak bisa ditemukan mungkin air-air yang sifatnya komersil itu juga banyak ditemukan.

Tetapi kemarin itu saya sempat kunjungan ke daerah selatan, Cianjur bagian selatan, dan disitu amat sangat memprihatinkan, mereka tidak mempunyai air. Akhirnya satu-satunya air yang mereka andalkan adalah air sungai, dan air sungai pun sebenarnya sudah sangat tipis, sudah tidak mengalir. Orang mandi disana, terus kemudian buang air kecil ataupun besar disana. Terus kemudian juga air itu masih di keruk oleh truk-truk yang akan



menjual mendistribusikan ke beberapa yang di pegunungan yang bukit-bukit agak tinggi. Saya amat sangat prihatin. Kalau misalkan kami mendapatkan air, katanya, itu luar biasa. Jangankan untuk perkebunan, persawahan, dan sebagainya, untuk sehari-hari saja mereka itu tidak ada. Dan saya sampai teringat bahwa mungkin beberapa puluh tahun yang akan datang barang-barang yang menjadi mahal itu diantaranya adalah air bersih dan udara bersih. Dan saya kira ketika terjadi kekeringan, hari ini sudah terjadi Pak seperti itu.

Alangkah baiknya mungkin untuk SDA program JIAT (Jaringan Irigasi Air Tanah) saya kira itu juga selain untuk bagaimana keberlangsungan hidup masyarakat yang mayoritas ini adalah tani itu bisa berjalan. Tetapi juga bagaimana air tersebut bisa digunakan untuk air minum. Karena kalau bicara SPAM itu sudah tidak mampu memfasilitasi lagi kebutuhan mereka, maka saya kira JIAT itulah mungkin untuk ke depan juga mohon ini diberi prioritas untuk daerah-daerah yang kering itu, maka mungkin bisa di tambah itu yang untuk JIAT khusus untuk daerah-daerah yang kering itu. Karena kasihan Pak kalau sudah tidak ada air itu bagaimana hidup kita.

Terus untuk selanjutnya untuk Cipta Karya. Untuk Cipta Karya ini sebenarnya butuh banyak inovasi. Memang disini anggarannya tidak begitu banyak, tapi agak lumayan. Tetapi Cipta Karya inikan kebanyakan juga banyak di daerah perkotaan, maka saya kira untuk bagaimana bisa mengakomodir berbagai permasalahan di wilayah perkotaan itu maka Cipta Karya juga harus punya inovasi.

Dan kalau untuk di perkotaan itu misalkan kalau kita kekurangan anggaran sebenarnya kan kalau kita jeli bisa bekerjasama dengan mungkin investor dan lain sebagainya, maka hal-hal itu kenapa tidak bisa mungkin dilakukan oleh Kementerian PUPR seperti halnya juga yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan saya kira ketika mereka terbatas dengan anggaran maka hal yang sifatnya mengandung nilai komersil tinggi dan sebagainya maka bisa bekerjasama. Tetapi tentu saja dengan pertimbangan satu lagi itu yang harus digarisbawahi, dengan pertimbangan agar bagaimana benefit untuk masyarakatnya itu lebih besar ketimbang profit mungkin yang di terima oleh para investor itu. Itu yang harus jadi pertimbangan. Jadi seimbang, minimal seimbang. Jangan sampai kemudian profit yang dihasilkan oleh investor itu lebih besar ketimbang benefit yang dirasakan oleh masyarakat.

Mungkin itu saja, terima kasih.

***Walloohulmuaafiq Illaa Aqwaamitthooriq  
Wassalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.***

Dan ijin saya juga akan memberikan beberapa usulan dari daerah pemilihan.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Ibu Ning.

Pak Bakri. Siap-siap Pak Johny Allen, terus kemudian Pak Anton Sihombing.

**F-PAN (H. A. BAKRI H.M., S.E):**

Terima kasih.

**Pak Menteri dan seluruh jajarannya.  
Pimpinan dan Anggota Komisi V yang saya banggakan.**

Pertama saya ingin mengucapkan selama ini pada jajaran Kementerian PUPR yang telah sukses bersama-sama kita melaksanakan pembangunan infrastruktur di Sea Games yang lalu, *alhamdulillah* cukup bagus dan mendapat *applause* dari seluruh dunia tentunya.

Saya langsung saja, Pimpinan, Pak Menteri, saya ke Binamarga dulu. Karena di kasih waktu 3 menit ini. Pertama saya minta tolong diperhatikan di Provinsi Jambi yaitu terkait dengan jembatan-jembatan yang sudah tua. Itu mulai dari Sarangun, Merangin, Bungo Tebo, sampai ke Batanghari, sampai ke Muarajambe. Itu sebagian besar umur jembatan itu sudah melebihi. Ini tolong menjadi perhatian. Pada saat saya kemarin kunjungan kerja di Jambi bersama teman-teman di PUPR saja adalah sudah saya sampaikan, dan mereka katanya sudah mengusulkan. Ini tolong diperhatikan, karena rawan sekali terhadap jembatan-jembatan ini yang umurnya sudah melampaui.

Sekarang ini memang sedang juga dikerjakan jembatan Batang Bungo, dan kita harapkan juga Batang Tebo, Batang Merangin, sampai ke jembatan-jembatan yang tentu umurnya sudah tua.

Yang kedua, jalan. Jalan ini juga di Jambi ini setiap tahun mendapat perhatian. Tapi selalu sifatnya *spot-spot*. Jalan dari Muara Bungo, Sarwangun, Merangi, Kerinci, Kebangko, Kebatanghari, ini selalu saja terkadang-kadang Pak Menteri itu belum sampai setahun jalan yang tidak diperbaiki itu rusak, jadi sifatnya tambal sulam-tambal sulam. Ini saya minta tolong betul diperhatikan. Karena kalau saya lihat anggaran tadi Pak Menteri bilang lintas timur akan mendapatkan perhatian khusus, ini bagus. Tapi sayang juga kalau daerah-daerah ini yang lintas tengah ini tidak mendapat perhatian, itu mungkin perlu mendapat perhatian.

Yang berikutnya adalah jalan yang menuju ke satu kabupaten, namanya Tanjung Jabung Barat. Ini jalannya masih sempit dan sering terjadi kecelakaan. Itu juga kadang-kadang tambal sulam-tambal sulam. Dan secara pribadi saya sampaikan, kira-kira lebaran dua tahun yang lalu saya sendiri bersama keluarga terkena musibah di situ akibat dari jalan yang kecil yang berpapasan mengerem mendadak sehingga mobil saya hancur. Untuk satu keluarga saya tidak ada apa-apa. Itu di Kualatungka, menuju Kualatungka. Terus juga disana ada pelabuhan Boro yang sampai hari ini juga mungkin APBN belum masuk kesana, ini juga perlu menjadi perhatian.

Berikutnya, jalan Mendalo *alhamdulillah* sudah mulai dilaksanakan tahun ini. Dan saya dengar tahap keduanya ada anggaran khusus mungkin nanti yang ke lokasi menuju Kota Jambi itu juga mungkin perlu diperhatikan.

Menjadi catatan saya, disana itu sepertinya *drainase*-nya tidak menjadi perhatian, dikarenakan mungkin keterbatasan anggaran. Di 2019 saya berharap jalan ini selesai, tapi *drainase* ini juga selesai. Itu kira-kira tiga minggu yang lalu saya bersama Ibu Bupati Muara Jambi meninjau, banyak keluhan-keluhan disana. Terkait juga mengenai *drainase* dan aliran sungai pun disana juga perlu menjadi perhatian.

Berikutnya jalan menuju ke Muarasaba. *Alhamdulillah* target Pak Menteri kemarin tahun 2019 *Insyallah* selesai. Saya pun masih teringat melalui Ibu Sekjen juga, dulu ada anggaran yang seharusnya kita alokasikan kesana. Tapi saya tidak tahu kenapa. Saya cuma berharap di 2019 ini nanti mungkin bisa terakomodir, bisa selesai di 2019 untuk jalan menuju ke Muarasaba.

Begitu juga dengan jalan menuju ke Pelabuhan Ujung Jabung. Ini karena satu akses. Ini juga mohon perhatian. Karena kemarin pada saat raker dengan Pak Menteri Perhubungan Beliau juga tahun ini sudah menganggarkan hampir 60 miliar untuk pelabuhan itu. Tapi Beliau juga menyatakan dari Kementerian PUPR juga mungkin tolong diupayakan bagaimana bersinergi dengan Perhubungan.

Begitu juga dengan daerah Kerinci yang sering terjadi longsor. Ini juga mohon menjadi perhatian. Termasuk juga jalan menuju ke Candi. Candi Muara Jambi ini akses destinasi dunia juga ini. Candi ini tahun ini memang ada pelebaran, mungkin tahun depan juga perlu menjadi perhatian.

Kalau di Irigasi yang saya soroti adalah pertama itu mengenai penanggulangan banjir Kota Jambi, JFC itu Pak. Itu pintu-pintu airnya sudah selesai semua, tapi sampai hari ini belum difungsikan secara maksimal, karena adanya katanya bantuan luar negeri yang akan membantu untuk membantu mengenai *drainase* dalam kota. Ini saya juga mohon kepastiannya. Jangan sampai nanti adanya pintu-pintu air itu yang bisa membantu mengurangi atau memompa air tapi tetap terjadi banjir. Karena di Jambi ini yang menyebabkan banjir itu bukan karena sungai Batanghari yang meluap itu, tapi hujan yang kuat itu yang debitnya tinggi itu sehingga tidak tersalurkan. Ini yang perlu menjadi perhatian. Karena pintu air itu yang ada tiga pintu air yang besar yang ada di Kota Jambi itu sekarang itu menjadi monumen besar sekali, bagus sekali. Dan harapan saya juga mungkin bisa diresmikan oleh Pak Menteri. Ini belum bisa difungsikan secara maksimal pintu air itu.

Terus termasuk juga perbaikan Danau Sipi. Ini juga bersama pemerintah provinsi/kota pun ikut serta. Saya juga berharap peran APBN ini jangan sampai *stop* supaya rehabilitasi Danau Sipi terus ditingkatkan.

Begitu juga dengan irigasi Lawa. Ini saya sedikit agak fokus disini, Pak Menteri. Karena di daerah Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Barat itu mayoritas disana adalah petani dan kelapa, dan dulu-dulu 2-3 tahun yang lalu

itu selalu mendapat perhatian mengenai irigasi rawanya. Tapi 1-2 tahun ini sama sekali boleh dikatakan nol. Terbiasanya ini dikelola APBN.

Juga menjadi perhatian saya juga, tadi saya lihat disini dipaparkan, jadi saya mohon betul Pak Dirjen melalui stafnya nanti betul-betul menjadi perhatian mengenai pembebasan lain, karena kemarin masih ada beberapa titik itu yang masih terkendala. Saya merasa senang karena ini program yang betul-betul Pak Menteri nya baru di lantik sudah langsung kesana. Harapan saya ini nanti sebelum periode ini berakhir ini bisa selesai.

Terakhir, Cipta Karya. Cipta Karya ini mungkin banyak aspirasi daripada masing-masing anggota. Saya nanti akan susulkan termasuk juga masalah rumah khusus, rusunawa, ruang hijau, dan kotaku. Catatan-catatan ini mungkin akan kami serahkan secara tertulis nanti kepada masing-masing dirjen atau masing-masing direktur.

Hanya itu mungkin, Pimpinan, terima kasih.

***Wabillaahitaufiq Wal Hidaayah  
Wassalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.***

**KETUA RAPAT:**

***Wa'alaikumsalaam.***

Terima kasih Pak Bakri.  
Pak Johny Allen. Siap-siap Pak Anton Sihombing.

**F-PD (DRH. JHONI ALLEN MARBUN, M.M):**

Terima kasih.

**Pimpinan dan Anggota,  
Menteri dan para stafnya,**

**F-PG (HJ. SANIATUL LATIVA):**

Interupsi, Pimpinan, sebentar, mohon maaf.

Ini menyambung Pak Bakri. Karena tadi sudah disepakati bahwa 'ikan sepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus', sebagai pendukung pemerintah juga, mungkin saya tidak menyampaikan secara lisan, tetapi semua sudah disampaikan secara lisan oleh Pak Bakri. Jadi saya mau menyampaikan secara tertulis saja Pak. Boleh ya, mohon ijin Pimpinan.

Terima kasih Pak Bakri.

**KETUA RAPAT:**

Ini satu dapil yang kompak ini.

**F-PD (DRH. JHONI ALLEN MARBUN, M.M):**

Pak Menteri, pada tanggal 17 Juli anggaran subsidi pemerintah 102, setelah RAPBN menjadi 110. Ada penambahan kurang lebih tadi disampaikan 8,7 triliun, dimana itu dimasukkan secara *totality* kepada Dirjen Cipta Karya dengan program RPJM 2,14 triliun daripada pemerintah, dan penguatan sumber daya manusia 6,56 triliun. Dengan rincian kegiatannya adalah untuk pembangunan sekolah 14.500 ruang, dan perguruan tinggi. Di dalam pengajuan pagu anggaran oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian PU, Binamarga sebagai tupoksi yang pokok infrastruktur mengajukan 53 triliun yang sama sekali tidak kebagian sebarangpun atas menjadi 40 yang tahun sebelumnya adalah 46 triliun, sementara PU itu pasti di dengar adalah pekerjaan umum dan perumahan. Tambahan perumahan. Kalau dulu tidak pernah di kenal menyangkut adalah perbaikan sekolah dan perguruan tinggi.

Perbaikan sekolah perguruan tinggi 20 persen minimal dari APBN oleh Diknas dan Departemen Agama. Oleh karena ini jangan nanti ini menjadi rancu. Hampir 6,56 triliun untuk pembangunan sekolah yang tadi pertanyaannya jelas apa iya. Menurut saya rakyat saja bisa mengajukan, apalagi DPR, sesuai dengan persyaratannya. Itu komentar saya untuk itu, apa saja boleh kita ajukan.

Oleh karena itu dari ajuan Bapak 53 triliun dalam pagu usulan kementerian Bapak yang baru tercapai hanya 40 triliun, masih ada 12 triliun. Sementara ada pagu 6,5 triliun yang semuanya dialokasikan adalah untuk perbaikan sekolah. Saya kira menurut hemat saya tidak tepat sebagai tupoksi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan, sementara itu adalah tupoksi pendidikan nasional dan pendidikan agama. Oleh karena itu, Pimpinan, kita harus lihat. Kecuali jaman orde baru perguruan tinggi itu ditangani pembangunannya oleh Departemen Pekerjaan Umum. Kalau sekarang sudah diserahkan bantuan-bantuan, bahkan pendidikan perguruan tinggi. Itulah banyak masalah-masalah di pendidikan. Maka saya dulu setuju kembali lagi PU pembangunan perguruan tinggi itu.

Sekolah SD di kabupaten, SMA provinsi, bantuan dari Diknas sesuai dengan aturan. Masuk lagi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan yang baru saya dengar baru kali ini anggarannya begitu besar, sehingga tadi banyak pertanyaan 'boleh atau tidak'. Apa persyaratannya, supaya kita bisa melakukan sinkronisasi antara kebijakan itu antara eksekutif dan legislatif untuk melakukan tupoksi masing-masing sebagai hak anggaran legislasi dan hak undang-undangnya.

Oleh karena itu, Pak Menteri, usul konkrit saya, 52 triliun yang masih mencapai 53, masih ada selisih 13. Oleh karena itu saya minta saran untuk sekolah yang 6,6 triliun itu dipertimbangkan untuk kembali kepada tupoksi, dialokasikan kepada Binamarga selaku tupoksi pekerjaan umum, dimana jalan kita selalu masih kurang dan masih kurang, sementara sekolah saya khawatir terjadi duplikasi atau multifikasi dari berbagai departemen atau dana-dana daripada DAK dari daerah. Karena ini juga saya rasa informasi masih baru.

Usul konkrit saya atau saya minta penjelasan Pak Menteri kenapa itu menjadi muncul prioritas sangat tiba-tiba, sementara Binamarga masih membutuhkan 13 triliun.

Yang kedua, pertanyaannya berikutnya, dibawahnya ada tanda bintang, belum termasuk pagu KBPU kurang lebih 5,1 triliun. Ini tolong juga ini apa maksudnya dan apa programnya. Pak Menteri, itu dalam konteks RKAKL, karena ini membahas RKAKL.

Kebetulan saya turun dapil dari Taput ke Tapteng, keliling. Dan saya berterima kasih, Pak Menteri Pekerjaan Umum disitu membangun perbaikan jalan nasional dan *drainase* kiri-kanan jalan. Tapi dalam perjalanan saya lihat bukit-bukit adalah tegak lurus tanah itu, sehingga saluran itu sudah di bangun, berjatuhan itu tanah, tertutup itu saluran. Tanah yang jatuh itu tegak lurus kurang lebih bisa 6-8 meter.

Pak Menteri, orang tua kita petani, orang tua saya pun petani, petani saja bikin terasiring kalau terlalu tinggi. Tidak ada tegak lurus. Saya tidak tahu apakah salah dimana. Oleh karena itu menjadi perhatian. Foto-fotonya saya banyak, sudah tertutup itu *drainase* daripada kiri-kanan jalan nasional perhubungan antara Taput, Sibolga, dan masuk nanti ke Riau dan ke Jawa.

Pertanyaan kedua, Pak Menteri, karena disini saya lihat ada program jalan Bogor, karena tidak ada plangnya. Kotamadya Bogor itu sekarang di cor beton semuanya, sehingga jalannya lebih tinggi daripada trotoar. Padahal jalan itu sebetulnya mulus, sudah terbentuk dia strukturalnya. Betonnya sekitar 20 senti, padahal baru di lapis tahun lalu. Betonisasi sekarang Bogor itu dan menjadi macet. Saya belum tahu, tapi karena saya baca disini ada disini jembatan *fly over* Bogor, apakah itu program dari APBN. Kalau APBD menurut saya tidak mungkin uangnya sebesar itu, atau provinsi. Kenapa, karena menurut hemat saya, saya tidak ahli konstruksi, pembuatan jalan beton tidak jalan-jalan yang memang landasannya belum stabil. Jalan-jalan sudah aspal bagus, saya di Bogor saja 40 tahun, masih di aspal tebal oleh beton. Di Kotamadya Bogor, Martadinata itu Pak, kembangan merah. Jalan beton, padahal di lapis tiap tahun juga bagus, baru tahu itu di lapis, dan membuat macet. Pertanyaannya, apakah itu APBN? Provinsi, tetapi disini Martadinata *fly over*.

Tolong ini menjadi masukan. Padahal di lapis selama ini sudah bagus, artinya menurut saya disitu membuang-buang uang tidak pada tempatnya dan membuat masalah baru, jalan itu menjadi lebih tinggi daripada jalan setapak, dan toko-toko dipinggirnya itu airnya pasti masuk ke tokonya. Ini barangkali apakah daerah, mungkin juga Bali bisa sinkronisasi. Karena ini Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan negara bagian Jawa Barat, atau bukan pemerintah otonom.

Itu barangkali yang penting. Itu hanya pertanyaan saja untuk menjadi perhatian Pak Menteri. Demikian juga tele vertikal itu, jatuh lagi, tertutup lagi itu saluran.

Tambahan kunjungan dapil Komisi V ke Jawa Timur. Saya tidak bicara dapil tapi bicara pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia, ke

Jawa Timur-Pacitan. Kemarin dengan Pak Menteri bahwa daerah sudah mengalokasikan kurang lebih hampir 30 miliar dalam pembebasan jalan dan pembukaan sementara. Bahkan sudah ada pengerasan walaupun belum normal. Dan itu adalah untuk jalan ke pelabuhan laut. Dan itupun menurut informasi daripada bupati itu sudah menjadi status jalan strategis. Oleh karena itu, karena ini kunjungan Komisi V spesifik, sebagaimana teman-teman saya tadi, saran kami supaya jalan itu tidak semakin rusak. Karena di atasnya sebelahnya gunung, *drainase*-nya walaupun sama sekali tidak ada, sehingga merusak fundamental jalan itu yang sudah terjadi. Salah satu direktur Bapak dari balai juga hadir pada waktu itu. Artinya itu saya minta menjadi perhatian. Kalau tidak, mubazir uang 30 miliar yang dialokasikan oleh bupati Pacitan-Jawa Timur.

Itu saja menjadi masukan Pak Menteri, terima kasih. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan saya mohon maaf, karena memang itulah yang bisa saya sampaikan dalam konteks membahas RKAKL dan faktual pekerjaan-pekerjaan di lapangan untuk mendapatkan perhatian Menteri.

Terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak Johny Allen.

Selanjutnya Pak Anton Sihombing. Siap-siap Pak Agung Budi Santoso.

#### **F-PG (Dr. CPT ANTHON SIHOMBING):**

Terima kasih Pimpinan.

**Anggota Komisi V DPR RI yang saya hormati,  
Menteri dan seluruh jajarannya yang saya hormati,**

***Assalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.***

Saya butuh waktu satu menit saja, Pimpinan, karena yang saya nikahin sirih nunggu di ruangan.

Secara detailnya, Pak Menteri, tolong diperhatikan Sumatera Utara balai jalan nasional. Saya tidak usah ucapkan satu-satu, nanti dengan eselon satu akan saya sampaikan, dan SDA. Banyak sekali. Apalagi Cipta Karya banyak sekali, belum pernah ketemu dengan kepala balainya.

Di Sumatera Utara itu Sungai Asahan itu sangat memakan atau meminta perhatian yang sangat besar sekali. Tapi petani di Asahan atau Tanjung Balai itu tidak ada air. Terus kalau bisa itu dari 8 juta hektar program presiden irigasi kalau tidak salah, 10 persen saya rasa ada di Asahan. Itu memakan perencanaan yang matang dan biaya yang besar. Jadi nanti akan saya berikan tertulis. Tapi kalau saya katakan Asahan ini mungkin direncanakan tahun depan. Memang 10 persen dari yang diharapkan presiden itu sawahnya ada disana. Kasihan sekali disana.

Terus Direktur Bedah Rumah. Saya dari anggota yang paling sedikit saya. Paling tinggi 700 sekian. Teman-teman ada yang 2.000-3.000. Sekali ini aku minta prioritas, karena 10 kabupaten/kota.

Pak Menteri, itu saja yang saya sampaikan. Kita perdalam nanti di pertemuan dengan eselon satu.

***Wabillaahitaufiq Wal Hidaayah  
Wassalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.  
Horas.***

Satu lagi, Pimpinan.

Kalau Saat Sitanggung kan pindah dapil, Saat Silaban. Jangan lagi memperjuangkan dapil yang lain, dapil tetangga saja diperjuangkan. SSA (setia sampai akhir).

Terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Ini masih ada tiga anggota, Pak Agung, Ibu Novi, Ibu Intan, Andi Wanaras. Tapi Pak Lasarus mau ijin, kita kasih kesempatan dulu Pak Lasarus.

Silakan Pak.

#### **PIMPINAN/F-PDIP (LASARUS. S.Sos):**

Mohon ijin Pak, ada tugas khusus.

Baik, Pak Menteri, saya sedikit saja. Karena saya ini tiap tahun tidak pernah menyerahkan catatan, jadi semua saya umumkan secara terbuka. Karena saya dulu pernah di tanya-tanya waktu disana, jadi saya tidak mau nanti di tanya lagi.

Jadi saya ke Kalbar langsung saja lah, supaya singkat. Terima kasih Pak Menteri, salam dari masyarakat Kalimantan Barat, khususnya Kabupaten Sintang, atas naiknya status jalan Sintang Sinanim yang dianggarkan pada tahun 2018 yang lalu. Dan mohon perhatian kalau bisa ini diteruskan programnya menuju ke Sinanim.. Karena memang dari tiga jalan menuju ke perbatasan itu yang paling belakang memang simpang Sinanim, dan sudah di mulai tahun 2018. Tentu harapan masyarakat Sintang. Karena disini ada kurang lebih 90 ribu jiwa yang menggunakan jalan ini setidaknya untuk program ini untuk dilanjutkan.

Terus yang kedua, jalan yang menuju ke Kabupaten Melawi sekarang sudah hancur, rusaknya cukup parah. Ini mohon juga kiranya program ini bisa diselesaikan sampai di ibu kota kabupaten. Ini negara jalan negara menuju kabupaten/kota Nangapinok.

Kemudian yang Sintang menuju ke Skadal ini sekarang sudah mulai juga 2018 kemarin jembatan-jembatan yang satu mobil itu sekarang sudah beberapa dikerjakan tahun 2018 kemarin. Dan berharap juga kita ini tetap diteruskan program ini sehingga bisa selesai.



Kemudian jalan menuju ke Bandara Tebelian Sintang. Dulu ini jalan dikerjakan oleh kabupaten. Itu kualitasnya sangat menyedihkan, sehingga jalannya rusak menuju ke bandara. Kami kemarin waktu kunjungan kerja komisi kita sudah mohonkan untuk bisa diambilalih oleh pusat, karena ini menuju ke obyek vital, menuju ke Bandara Tebelian. Ini bandara baru sudah beroperasi sekarang.

Kemudian untuk Sintang Putussibau. Saya kemarin waktu ke dapil banyak keluhan ada beberapa kegiatan tidak bisa jalan maksimal. Karena yang memenangkan kegiatan ini tidak punya ijin galian C. Saya juga tidak tahu bagaimana tidak punya ijin galian C bisa dimenangkan. Akhirnya pekerjaannya melambat.

Tadi kejadian yang Pak Johny Allen tadi saya lihat ada juga di Putussibau ke Sumangot. Setahu saya tidak ada kegiatan disini tapi saya lihat jalan kemarin *go over lay*, tapi masyarakat disitu juga tidak tahu, juga tidak ada papan proyeknya. Saya takutnya ada pengalihan kegiatan dari ruas lain karena masalah galian C tadi. Karena dia tidak kuat mengangkut dari mana akhirnya .....sudah dilalui, ini juga mohon diperhatikan. Saya sudah telepon kepala balai, tapi agak susah saya telepon kepala balainya. Beberapa kali saya hubungi tidak di angkat, ya sudahlah. Jadi itu kondisi untuk Kalbar.

Dan terima kasih juga saya lihat di program tadi Pak Menteri akan bangun juga pos lintas batas di Jaboy. Ini salam juga dari masyarakat Bengkayang. Tinggal nanti terakhir yang di Sintang itu di jasa yang mungkin nanti akan yang terakhir.

Untuk jalan paralel saya pikir saya tidak perlu komentari. Karena ini sudah jadi program strategis nasional pasti ini sudah dianggarkan sebagaimana mestinya. Karena memang target pemerintah tahun 2019 ini sudah tembus sampai ke Kalimantan Timur. Tentu kita dari perbatasan mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kementerian PUPR. Ini sangat terasa Pak, selama 5 tahun ini begitu terasa pembangunan di Pulau Kalimantan itu. Mudah-mudahan, saya berdo'a, bukan berdo'a saja, terus bekerja, yakin Pak Jokowi jadi presiden lagi, lima tahun lagi selesai lah pembangunan jalan di Pulau Kalimantan itu. Kan do'a kan boleh Pak, boleh. Kita orang politik do'a sekalian kerja. Kalau tagar saya tidak boleh komentar. Ini demokrasi. Tapi kalau saya do'a dan kerja.

***Wassalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.***

**F-PD (WILLEM WANDIK, S.Sos):**

Pak Ketua, interupsi.

Ini menyambung sedikit dengan apa yang ditemukan oleh Pak Lasarus didapilnya sana.

**Pak Menteri serta seluruh jajarannya yang kami cintai dan kami banggakan,**

Memang kasus serupa juga kami temukan di dapil kami, ada satu korporasi dimana tidak memenuhi syarat, tidak memenuhi peralatan alat berat, dan juga *office*, dan juga *personil* disana, tapi dimenangkan, sehingga kegiatannya sudah masuk termin ketiga tidak ada aktifitas di lapangan. Harapan saya kedepannya ini bisa menjadi perhatian kita bersama.

Sekian, terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak Willem.

Ini tadi ada tambah lagi dua ini.

Pak Agung Budi Santoso. Siap-siap Ibu Intan.

**F-PD (AGUNG BUDI SANTOSO, SE., MM):**

Terima kasih Pimpinan.

***Assalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.***

**Yang kami hormati, Pimpinan. Utamanya Pak Anton Sukartono Surato yang kami banggakan, biar tidak di pindah Komisi V saya.**

**Yang kami banggakan sahabat-sahabat Komisi V, dan**

**Tentunya yang terhormat Pak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat beserta jajaran yang berbahagia.**

Saya ingin menegaskan, Pak Menteri, bahwa apa yang disampaikan Pak Gatot tadi memang betul bahwa teman-teman Komisi V ini rata-rata bisa kembali lagi menjadi anggota DPR berkat program-program dari Kementerian PUPR. Tidak ada lagi kementerian lain yang bisa sehebat dorongannya apa yang diberikan oleh Pak Menteri. Jadi dari statistik disini bahwa teman-teman Komisi V itu yang paling banyak kembali lagi masuk menjadi anggota DPR. Saya dari Demokrat Pak. Tentunya karena hal itu kami juga memberikan apresiasi kepada Bapak Menteri.

Kemudian kami juga menginginkan bahwa karena dapil kami adalah kota dan kota, sehingga seringkali kami tidak mendapatkan apresiasi yang harus kami perjuangkan, karena hal itu hanya ditujukan kepada wilayah kabupaten. Seperti PISO Pak, kami tidak mendapatkan itu. Dulu ada BPIP kami juga tidak mendapatkan itu. Sedangkan kami pada waktu tanggal 1 Oktober 2014 kami di sumpah bersama-sama untuk wajib memperjuangkan aspirasi daerah pemilihan, untuk itu kami menginginkan adanya keberimbangan. Sehingga kalau teman-teman mendapatkan PISO ya kami yang daerahnya kota dan kota dapilnya tolong diberikan program lain yang bisa kami perjuangkan untuk itu.

Kemudian yang saya dapatkan dari daerah pemilihan merupakan aspirasi dari daerah pemilihan bahwa ada program yang betul-betul bisa mengena kepada masyarakat di daerah pemilihan kami, adalah BSPS Pak. Ini sangat luar biasa sekali. BSPS ini program yang betul-betul langsung

menyentuh ke jantung hati masyarakat, sehingga masyarakat yang mendapatkan bantuan itu akan selalu teringat kepada kami. Ini penting bagi kami, karena juga merupakan kantong politik Pak.

Dalam anggaran 2019 ini ada 200 ribu. Yang 8 ribu itu untuk perumahan baru, yang 192 ribu untuk peningkatan kualitas. Kami kiranya memohon agar angka itu bisa di tambah, angka itu bisa menjadi program strategis semuanya, sehingga diusulkan oleh Anggota Komisi V.

Dan ada yang kami lihat di lapangan yang baru inikan angkanya 15 juta. Tetapi kan di bagi dua Pak, 12 setengah juta untuk material dan yang 2 setengah juta untuk HOK atau upah kerja. Maksud saya jangan di bagi dua seperti itu, tambah saja Pak. Jadi katakanlah 17 setengah. Untuk materialnya 15 juta dan untuk HOK nya 2 setengah juta. Jadi justru sebetulnya dengan 15 juta diberikan material saja sudah kurang Pak, karena kami masih meminta adanya swadaya dari para pemanfaat. Ini malah dikurangi, diberikan untuk HOK. Jadi kalau bisa jangan dikurangi, ditambahkan saja. Jadi 15 juta tambah HOK nya 2 setengah juta. Itu yang kami dapatkan di daerah pemilihan.

Kemudian nanti hal-hal lain akan kami perdalam bersama eselon satu. Dan ada yang ingin saya tanyakan mengenai kelanjutan dari penanganan banjir di Cimahi-Bandung, yaitu banjir di Daerah Melong, sungainya sungai Cilember, yang saya berikan berkasnya di 2015 yang lalu, sudah lama. Ini kami mendapatkan progresnya agak sulit. Jadi kami mengharapkan mungkin ada komunikasi yang lebih baik antara kepala daerah, mungkin dirjen dengan kami, sehingga kami bisa tahu dimana kira-kira hambatannya. Karena di dalam penyelesaian banjir itu dibutuhkan pembebasan lahan. Ini yang pembebasan lahannya ada di wilayahnya daerah Pak. Bukan di wilayahnya Bapak disini. Tapi kalau lahan ini tidak dibebaskan, program Bapak tidak bisa jalan fisiknya. Jadi kami ada komunikasi yang lebih baik lagi antara Kementerian PUPR, anggota DPR, dan kepala daerah, sehingga kita bisa menyelesaikan bersama.

Kemarin saya baru berbincang-bincang santai dengan Pak Walikota Cimahi, Beliau katanya sudah menganggarkan, dan berharap 2019 sudah dilaksanakan. Sedangkan saya mendapat informasi dari Pak Dirjen yang baru, selamat Pak Yogi sudah naik jadi dirjen dari Direktorat Sungai dan Pantai. Jadi Beliau yang mengawal Pak. Disitu terbukti bahwa tidak ada komunikasi. Jadi Pak Walikota mengharapkan 2019 sudah dijalankan, tapi informasi dari Pak Yogi 2018 sudah ada pekerjaan fisik. Ini mungkin yang harus kita perbaiki bersama komunikasi ini agar hal-hal seperti itu bisa lancar. Juga untuk Pak Yogi kami juga meminta nomor yang baru. Karena saya ada tiga nomor Bapak, saya SMS tidak ada jawaban. Jadi bagaimana kami membangun komunikasi.

Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. tentunya kembali kami menyampaikan kepada Pak Menteri untuk diberikan porsi lebih banyak untuk program-program yang langsung menyentuh yang bisa kami usulkan langsung. Sehingga tentunya harapan masyarakat yang diwakili oleh Bapak-bapak di Komisi V ini sangat banyak. Ada jalan, ada jembatan, ada rumah, ada embung, sehingga kami berharap kami bisa melanjutkan tugas yang belum tuntas untuk daerah pemilihan kami.

Terima kasih.

***Assalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.***

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak Agung.

Pekerjaan rumahnya memang di Komisi V itu ada paling sedikit tiga yang mereka punya dapil itu di kota, yaitu Pak Agung, Ibu Intan, Pak Sigit, dan Pak Sungkono.

Ibu Intan, dan terus Ibu Novi. Silakan, Ibu Intan.

**F-PAN (Hj. INTAN FITRIANA FAUZI, S.H., L.L.M):**

Terima kasih Pimpinan.

***Assalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.***

**Yang terhormat, Pimpinan dan Anggota Komisi V.  
Yang terhormat, Pak Menteri/Pak Dirjen beserta jajaran.  
Ibu Sekjen yang saya hormati.**

*Stressing* saya tadi *statement* Pak Ketua setuju bahwa anggaran SDA perlu ditingkatkan, karena dapil saya itu Depok dan Kota Bekasi banyak sekali situ dan sungai-sungai yang jumlahnya banyak tapi anggarannya kecil sehingga pemeliharaan situ dan sungai itu sangat memprihatinkan, harus bergiliran, sementara itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Kalau jalan, infrastruktur lain, jembatan, bisa di tunda, kalau penanganan sungai dan lain kan sangat krusial buat kehidupan manusia.

Kemudian juga *stressing* Pak Sigit sama, saya hanya dua kota, tanpa kabupaten. Dari Kemendes sudah tidak dimungkinkan, karena memang kelurahan. Terus kalau kemudian di PUPR ini juga tidak bisa masuk kota sehingga banyak program masyarakat yang sayang sekali tidak bisa dinikmati oleh warga kota Depok dan Kota Bekasi.

Inti permasalahan di Depok dan Bekasi ini adalah utamanya air baku bersih untuk masyarakat Kota Bekasi dan Kota Depok, karena kualitas ketersediaan sumber air itu sangat buruk, terutama karena bersumber dari sungai-sungai Ciliwung. Dan sekarang ini yang perlu percepatan restorasi dan normalisasi adalah Kali Bekasi, kondisinya saat ini hitam pekat dan busa berbuih putih karena pencemaran dari terindikasi 19 perusahaan. Dan levelnya adalah level koordinasi kesulitan buat pemkot, karena wilayah pabrik-pabrik tersebut berada di dua kabupaten, yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi, sehingga perlu rasanya pemerintah pusat turun tangan. Dan ini adalah merupakan sumber air baku PDAM Tirta Patriot yang ujungnya adalah 30 ribu pelanggan. Saya memiliki dokumentasi per 3 September, kalau hujan mereka membuang limbah itu ke Kali Bekasi ini. Namun pemkot tidak bisa apa-apa karena ini memang hulunya ada di Kabupaten Bogor.

Kemudian juga tanggul di Kali Bekasi ini ambruk pada awal 2017, yaitu Pebruari 2017. Dan pada awal 2018 sudah diadakan lelang oleh pemerintah pusat, kalau tidak salah anggarannya itu sekitar 11 miliar, dan ditargetkan perbaikan di mulai Maret 2018, tapi sampai saat ini belum terlihat. Mohon penanganannya Pak. Karena waktu yang diberikan sedikit, saya mohon ijin untuk menyampaikan secara tertulis kepada Pak Menteri.

Terima kasih.

***Wassalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.***

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Ibu Intan.

Ibu Novi. Siap-siap Pak Hamka.

**F-GERINDRA (Hj. NOVITA WIDJAYANTI, S.E., M.M):**

Terima kasih Pak Ketua.

**Pimpinan dan Anggota Komisi V yang saya hormati.  
Pak Menteri dan jajaran yang saya hormati.**

***Assalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.***

Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu kepada Pak Menteri dan jajaran karena selama ini sudah membantu kita/Komisi V kaitannya dengan program-program yang langsung berkaitan dengan masyarakat, seperti PSPS, PISO, jembatan gantung, dan lain-lain. Ini wajib disampaikan, terima kasih, dan berharap ke depan lebih banyak lagi. Aamiin.

Cilacap waktu tahun ini, dua tahun yang lalu kita datang untuk kunjungan ke Cilacap, dan alhamdulillah usulan dari Cilacap, seperti PDAM, itu turun kurang lebih 7 setengah miliar PDAM. Dan saya ceritakan bahwa di Cilacap itu mengalami kekeringan yang parah. Cilacap dan Banyumas kebetulan dua-duanya adalah dapil saya. Kemudian bantuan yang turun dari pusat 7 setengah miliar itu rencananya akan di buat jalur untuk air sepanjang 15 kilometer. Tetapi dengan 7 setengah miliar ini hanya bisa dilakukan untuk kurang lebih 1,2 kilometer.

Kemarin Kabupaten Cilacap datang dan berharap sekali bahwa bantuan untuk PDAM itu bisa direalisasikan, karena kemarin kering total. Bahkan hampir beberapa hari itu mati semuanya, Karena ada saluran yang milik Bengawan Solo itu dua bulan ada perbaikan, sehingga mandek selama dua bulan. Dua hari itu macet total, tidak ada air sama sekali. Itu untuk kota. Bahkan untuk yang daerah barat itu tiap hari kekeringan. Jadi harapan saya

untuk usulan yang PDAM itu bisa di bantu/direalisasikan supaya Cilacap tidak terus menerus kekeringan.

Kemudian yang kedua, ada saluran Kaliasa di Cilacap juga direalisasikan kurang lebih berapa miliar untuk pengerukan jalur nelayan yang nelayannya itu sangat susah. Tetapi anggaran yang turun ini ternyata atidak untuk mengeruk, hanya untuk perbaikan penampilan katanya, jadi penampakkan supaya terlihat indah atau bagaimana. Kemarin persis pimpinan DPRD nya datang. Jadi kelihatannya untuk perbaikan dulu, baru salurannya nanti. Mereka berharap sekali tolong bisa di lihat lagi, karena ini sangat penting untuk para nelayan di Kabupaten Cilacap.

Kemudian yang berikutnya adalah *fly over* di Kabupaten Cilacap dan Banyumas. Di Kabupaten Banyumas sudah di bangun *double track* Rawalo, itu sangat parah. Kemarin juga saya menyampaikan sempat kepada Dirjen Kereta Api supaya koordinasi dengan Kementerian PU.

Menurut saya untuk yang tahun lalu saya sudah menyampaikan pembahasan kemarin dengan Pak Menteri mengenai macetnya jalan di Kroya. Karena kereta api sudah bolak-balik lewat dan sangat panjang, sangat diperlukan sekali adanya *fly over* di Kabupaten Cilacap daerah Kroya dan Kabupaten Banyumas. Khususnya yang Banyumas itu adalah jalur Rawalo, karena itu macetnya sudah sangat panjang, dan itu satu-satunya jalur dari Kabupaten Banyumas menuju Cilacap di dekat Sungai Serayu.

Yang terakhir, saya berharap sekali, kemarin kan beberapakali kita kunjungan kerja kunspek Komisi V ke Makassar dan ke Kaltim. Jadi karena kita sudah mendatangi kesana, saya sangat berharap usulan-usulan dari Makassar, dari Kalimantan Timur, juga menjadi prioritas oleh Kementerian PUPR.

Yang terakhir lagi, tadi terakhir, ini kakaknya terakhir. Pak Ketua sepertinya ngeliatin terus, saya jadi bingung. Ini waktunya apa sudah lewat banyak apa bagaimana ini. Biasanya saya tidak suka yang lama, kali ini saya sedikit lama tidak apa-apa. Jadi yang terakhir sekali, hubungan Komisi V kemarin selama dirjen-dirjen yang sebelumnya itukan saya lihat sudah sangat harmonis. Dengan dirjen-dirjen yanb baru ini kita mungkin berharap makin harmonis. Jadi jangan sampai ada kedengaran di forum. Seperti Pak Agung atau yang lain bilang "saya WA tidak di balas". Karena saya dengar katanya "Bu Nur, saya di balas". Itu jangan-jangan karena Ibu Nur salamnya pakai sayang. Apa harus ada kode-kode sayang supaya di balas. Kira-kira itulah harapannya semakin harmonis, aspirasinya banyak, dan kalau rapat kita *happy* dan ketawa semuanya. Dan yang terakhir kita di kasih keselamatan oleh *Allah Subhaanahuata'aala*.

Terima kasih.

***Wassalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.***

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih.

Pak Menteri, saya tidak bisa interupsi, karena tadi Ibu Novi ngomong itu di *shooting*. Itu pesan dari Ibu Novi bahwa saya sedang lagi memperjuangkan daerah pemilihan. Jadi kalau kita minta *stop* kan tidak enak. Ibu Novi terima kasih.

Ini tinggal tiga anggota. Pak Hamka, Pak Rahman, dengan Pak Djadi. Silakan, Pak Hamka.

**F-PG (DRS. HAMKA BACO KADY, MS):**

***Bismillaahirrohmaanirrohiim.***

***Assalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.***

**Pak Ketua dan seluruh Anggota yang saya hormati dan saya banggakan. Pak Menteri dan seluruh jajaran.**

Pertama saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan saya, dan salam dari daerah pemilihan saya terhadap bantuan-bantuan aspirasi yang telah disalurkan. Yang paling mengesankan itu salam dari dua kampung di Kabupaten Jeneponto, 20 tahun baru akan menikmati penyeberangan jembatan gantung, dan menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Kementerian, dan khususnya tentu saya di lapangan lebih utama juga.

Terus terang 20 tahun itu waktu yang rasa-rasanya tidak bisa dibayangkan sehingga di depan matanya sudah terbangun. Dan pada waktu saya hadir disana, hari Minggu saya di undang meletakkan batu pertama, hari Senin itu hampir semua tokoh masyarakat yang ada di daerah itu puasa hari Senin. Itu laporan dari kepala desa, ini luar biasa. saya kira itu membanggakan sekali dan sangat-sangat terharu. Kalau Pak Menteri hadir itu pasti merasakan, tapi saya yang mewakili merasakan. Nanti saya sampaikan.

Selanjutnya, saya mencoba menganalisis dulu RKAKL. Saya tidak ikuti tadi pemaparan Pak Menteri. Saya merasa bangga. Dan sebenarnya yang agak susah kemarin kalau minta tambahan. Ini belum minta tambahan sudah di tambah. Artinya apa, pagu indikatif itu yang awal kita diskusikan kan 102. Muncul pada Agustus ini nota keuangan RAPBN beserta nota keuangannya 110,7. Ini patut kita berbangga dan berterima kasih barangkali. Karena memang kementerian ini adalah kementerian yang paling banyak memperlihatkan prestasi secara fisik, jadi wajar kalau mendapat tambahan seperti ini.

Hanya saja yang saya ingin berikna catatan sesuai dengan apa yang disampaikan tadi kawan terdahulu bahwa dari sisi penggunaan tambahan anggaran itu ada hal yang perlu dicermati yang mungkin bukan merupakan tupoksi kita, yaitu persoalan prasarana pendidikan, rehabilitasi sekolah rusak, penyelesaian pembangunan kampus, dan seterusnya. Ini yang mungkin kita perlu cermati latar belakang sehingga program ini diusulkan sehingga kita bisa menyelesaikan pembahasan ini dilandasi dengan aturan-aturan tupoksi yang ada.

Kalau dari sisi pendidikan pokasi 32 miliar itu boleh lah, karena terkait pada posisi pembinaan atau meningkatkan *skill* daripada tenaga-tenaga konstruksi. Itu yang menjadi catatan untuk RKAKL, karena selama ini dua hari berturut-turut Kementerian Perhubungan minta tambahan, Kementerian Desa juga minta tambahan, *alhamdulillah* mudah-mudahan ke depan ini bisa.

Meteorologi juga minta tambahan. Tidak menambah pekerjaan saya lagi karena sudah di tambah di Kementerian PUPR.

Selanjutnya, di sektor Cipta Karya saya ingin mengingatkan dan menagih barangkali bahwa saya dengar pada waktu yang lalu ada Balai Cipta Karya yang akan dilembagakan di provinsi. Saya sangat syukur dan bahagia dan bangga sekali kalau balai ini tercipta atau terbentuk. Kenapa, karena semua program-program kementerian yang ambil namanya itu kota dan kabupaten. Terutama program 'Kotaku'. Kotaku itu rata-rata setiap kelurahan itu sudah menerima 500 juta. Dan saya saksikan sendiri bagaimana kotaku itu dengan jalan setapaknya itu di bangun.

Tapi yang saya merasa sedih, dari anggaran yang kita sepakati Komisi V tidak pernah di sebut-sebut Komisi V ini. Hanya PUPR Kota Makassar. Jadi kalau menurut saya minta tolong barangkali dalam program-program Kotaku ke depan, karena ini adalah anggaran yang tupoksinya adalah Komisi V mungkin bisa kita juga terlibat untuk memonitor dan mengawasi itu. Dan kendalanya memang kemarin, karena memang mungkin staf dari PUPR tidak masuk disitu sehingga dicantolkan di Kota Makassar atau kabupaten lainnya. Termasuk Pansimas dan sebagainya seluruh program-program kemasyarakatan ini ada di Cipta Karya.

Binamarga nanti kita teknis, barangkali ada beberapa. Saya masuk di dapil saya, Binamarga dan SDA. Di dapil saya, Sulsel I tolong dilanjutkan pembangunan jalan Maros-Bone kalau masih bisa. Karena *alhamdulillah* saya jalan disana boleh dikatakan itu sudah tidak ada. Ada jalanan kayak huruf 8 itu sudah diluruskan menuju Bone. Tapi itu masih sedikit, tentu kita syukuri yang ada. Dan selanjutnya kami berharap barangkali masih bisa dilakukan apabila memungkinkan anggaran untuk itu.

Kemudian yang kedua adalah pelebaran jalan Sungguminasa-Malino Kabupaten Goa.

#### **KETUA RAPAT:**

Ada tertulis Pak? Bisa di foto nanti.

#### **F-PG (DRS. HAMKA BACO KADY, MS):**

Sedikit lagi, Pak Ketua.

Ada juga tertulis.

Ini kenapa Malino, karena ini adalah tempat wisata. Karena sudah di tegur Pak Ketua, saya berharap nanti di dalam penjelasan-penjelasan ataukah diskusi dengan eselon satu bisa kami kembangkan lebih jauh. Tapi yang paling penting dan terpenting yang ingin saya sampaikan disini untuk kita semua, mohon kiranya proses pekerjaan bantuan-bantuan ke depan sudah bisa dimulai penyerahannya paling tidak Januari atau Pebruari. Karena terkait pemilihan presiden, pemilihan pileg, untuk kita bisa mengambil manfaatnya dan menyampaikan kepada masyarakat inilah pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dan difasilitasi tentu oleh Anggota Dewan. Ini catatan yang menjadi stabilo kami, mohon kiranya kalau ada pra DIPA mungkin bisa dilakukan dengan baik.

Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, mohon maaf.



***Wassalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.***

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak Hamka.

Ini jembatan gantung Pak. Kita kan ada Whatsap intern Komisi V, jadi *share* jembatannya sudah jalan. Terus Pak Hamka *share*. Ini ketuanya belum sampai sekarang. Ini jangan-jangan Pak Menteri ini karena saya partai oposisi ini di tahan-tahan ini. Tapi saya lihat kepala balainya sudah agak sedikit kencang setelah kemarin kita bahas ini kok Ketua belum yang diusulkan. Sama dengan anggota disini saya usulkan dua-duanya belum. Bapak ini dua usulkan dua-duanya sudah jalan. Jadi saya kira kita harap ini bisa diselesaikan dalam bulan depan. Termasuk Pak Sidik juga belum katanya.

Pak Rahmat dan nanti Pak Andi Iwan Aras. Pak Willem lagi. Tetap tiga menit.

**F-PDIP (DR. H. RAHMAT NASUTION HAMKA, S.H., M.Si):**

Terima kasih Pimpinan atas waktunya.

Langsung saja. Pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Komisi V dan seluruh anggota yang mengalokasikan kunspek ke Kalimantan Tengah ini dalam waktu dekat ini/besok, yaitu mengunjungi daerah yang kemarin kami sampaikan kepada Bapak Menteri, yaitu terkait dengan jalan trans Kalimantan poros utama, yang mana jalan tersebut menghubungkan lima kabupaten dan juga dua provinsi, yaitu Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur arahnya. Dan ini dalam setahun itu tiga kali mengalami banjir dan selalu susah untuk dilewati sehingga sangat *urgent* sekali untuk dapat penanganan secara langsung dan menjadi program prioritas untuk nasional. Dan mudah-mudahan Bapak Menteri bisa mengutus yang terkait langsung hal tersebut, mungkin Pak dirjennya bisa terlibat langsung besok.

Kemudian selanjutnya adalah yang kedua abrasi pantai di daerah Ujung Pandang Kabupaten Gendingin Timur, yaitu Sampit, disana ada makam seorang ulama besar Kalimantan, yaitu cucu daripada Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari yang selalu mendapat kunjungan ziarah itu luar biasa dari mana-mana. Tetapi sekarang di ujung pantainya itu sudah mulai agak memprihatinkan. Jadi mohon kalau bisa mendapatkan perhatian. Karena kalau pemerintah kabupaten tidak mungkin sanggup lagi karena begitu luasnya keadaan abrasi tersebut.

Selanjutnya adalah daerah irigasi Kabupaten .....Timur yang mana sudah selesai, tapi dalam 10 tahun ini belum ada rehabilitasi. Karena ini mengairi kurang lebih 4.000 hektar persawahan. Mungkin rehabnya ini penting dilakukan segera, karena jangan sampai lebih parah lagi, karena sudah 10 tahun tidak mengalami rehabilitasi.

Mungkin itulah beberapa hal yang ingin kami sampaikan terkait hal tersebut. Kami sangat mendukung kebijakan Pemerintah terkait dengan mungkin perbaikan sekolah-sekolah rusak. Dan kebetulan ini terus terang saja, saya dari dulu punya pemikiran itu waktu di DPRD kabupaten/provinsi. Soalnya diknas, dikjar, dan sebagainya itu kalau bisa jangan mengurus konstruksi. Sekarang saja guru buruh sudah agak terbengkalai. Kadang-kadang mereka malas mengurus guru, tapi akhirnya mengurus konstruksi saja. Jadi sebenarnya kebijakan Pemerintah sudah agak mulai bagus ini mengarahkan masalah konstruksi itu kepada Kementerian PU. Supaya apa, diknas terkait itu, pendidikan tinggi dan sebagainya fokuslah mengurus kualitas guru dan kualitas dosen. Tapi harus punya kebijakan yang lebih fundamental ke depan. Apalagi ke depan nawacita kedua menekankan kepada revolusi mental. Saya pikir pas saja Pak, bikin saja regulasi, saya yakin pasti banyak yang mendukung, supaya ini lebih bisa menjurus kepada perbaikan SDM kita ke depan.

Terima kasih.

***Wassalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.***

Kami ijin menyampaikan secara tertulis.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih.

Pak Andi Iwan Aras. Siap-siap Pak Sudjadi.

**F-GERINDRA (H. ANDI IWAN DARMAWAN ARAS, S.E):**

Terima kasih Pimpinan.

**Yang saya hormati, Pimpinan dan Anggota Komisi V.  
Pak Menteri beserta jajaran yang saya hormati.**

Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Menteri, terkhusus Dirjen SDA, atas terealisasinya pembayaran pembebasan lahan pada bendungan Pasalora. Namun demikian masih ada beberapa catatan-catatan yang kira-kira sudah kami komunikasikan dengan Pak Dirjen. Dan terutama adalah lahan hutan industri yang juga di klaim, padahal lahan tersebut adalah lahan masyarakat. Yang saat ini juga saya selaku Anggota Komisi V sudah melakukan koordinasi dengan rekan Komisi IV agar itu juga bisa disampaikan kepada Kementerian Kehutanan. Namun terlepas daripada itu tentunya peran aktif dari Kementerian PUPR juga kita butuhkan untuk koordinasi dengan Kementerian Kehutanan secara langsung.

Yang kedua, saya ingin menanyakan tentang dampak kenaikan US Dollar yang saat ini 15 ribu. Mengingat bahwa hampir sekian banyak program-program atau paket kegiatan *multi years* yang tentunya nanti

membutuhkan eskalasi harga. Saya ingin menanyakan kepada Bapak bagaimana menyikapi adanya kenaikan US Dollar ini, karena tentu ada bahan-bahan atau material-material yang bukan berasal dari dalam negeri yang harus di beli dari luar negeri, atau terpengaruh dengan nilai US Dollar yang ada, apakah dengan keadaan itu akan mengganggu RAPBN 2019 ini atau tidak. Kalau memang ada kira-kira bagaimana menyikapi itu. Dan bagaimana tindakan Bapak terhadap permintaan pengusaha-pengusaha yang ingin meminta eskalasi harga kalau itu terjadi.

Selanjutnya yang ketiga menyangkut masalah sarana/prasarana pendidikan ini memang ada penambahan 6,5 triliun. Pada dasarnya apa yang disampaikan oleh Pak Rahman tadi itu memang bagus, cuma saya merasa ini ada tumpang tindih atau koordinasi yang perlu dilakukan dengan Kementerian Pendidikan atau Kementerian Agama, karena mereka juga melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Bahkan pemprov sendiri juga menggunakan APBD I dan APBD II juga melakukan hal itu. Ini kita kira-kira apa yang menjadi dasar sekolah yang mana atau universitas yang mana yang kemudian menjadi tanggungjawab atau tupoksi kita dalam menyelesaikan kegiatan itu. Kalau memang yang dilakukan sama saya merasa bahwa kenapa tidak sekalian keseluruhan daripada kegiatan prasarana pendidikan ini dan diambilalih kembali oleh Cipta Karya seperti dulu kala. Tapi kalau melihat kondisi ini saya lebih cenderung kita mengembalikan kepada kementerian masing-masing untuk masalah itu. Penambahan dana untuk dukungan prasarana pendidikan ini saya lebih cenderung Bapak alihkan ke direktorat jenderal yang lain. Apakah itu jalan, apakah itu sumber daya air. Mengingat anggaran yang ada di direktorat tersebut sangat minim, atau kurang daripada yang menjadi kebutuhan.

Salah satu contoh pengendalian banjir atau pengaman pantai saat ini sangat mendapat kurang perhatian. Kenapa seperti itu, karena memang anggarannya tersebut sangat terbatas. Mungkin ini bisa menjadi pertimbangan. Ataupun jalan-jalan lain, jalan-jalan nasional, khususnya di dapil saya di daerah Kabupaten Wojo, seperti yang disampaikan oleh Pak Abu Bakar tadi yang menghubungkan Sulawesi Selatan dengan Sulawesi Tengah itu harus mendapat perhatian lebih banyak lagi. Karena saat ini *alhamdulillah* saya terima kasih yang sebelumnya sudah pengalokasian anggaran, namun belum optimal, karena panjang luas jalan tersebut cukup panjang.

Jadi itu mungkin bisa menjadi pertimbangan Pak Menteri bahwa untuk pelaksanaan pendidikan ini ada baiknya ditinjau kembali untuk dialokasikan kepada direktorat jenderal yang memang tupoksi Bapak lebih ke arah sana dibandingkan kepada prasarana pendidikan ini.

Selanjutnya menyangkut program-program kemasyarakatan, seperti jembatan gantung. Saya juga walaupun partai oposisi ternyata sudah mendapatkan dua. Jembatan gantung di dapil saya *alhamdulillah* sudah dapat dua. Kalau itu juga memang sangat mendapat animo masyarakat. Seperti apa yang disampaikan Ibu Novi, tambah pengalokasian. Dan bedah rumah kami harapkan agar bisa di proses lebih awal, dan kemudian bisa dilaksanakan penyerahannya kepada masyarakat di awal-awal tahun sebelum bulan empat.

Lebih dan kurangnya saya ucapkan mohon maaf.

***Wabillaahitaufig Wal Hidaayah  
Wassalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.***

**KETUA RAPAT:**

***Wa'alaikumsalaam.***

Terima kasih Pak Andi Iwan Aras.  
Pak Sudjadi, terus Pak Willem.

**F-PDIP (IR. SUDJADI):**

***Assalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.***

**Ketua yang komplit, kurang satu, Lasarus.  
Bapak Menteri dan para Eselon I.**

Saya hanya mengingatkan, Bung Karno berkata "Jas Merah Jangan Lupa". Di Kompas di tulis orang-orang yang di balik layar sukses menyelenggarakan Asian Games 2018 salah satunya adalah Menteri PUPR. Buktinya di puji juga pada waktu penutupan oleh Wapres. Atas dasar itu saya di pesan oleh kyai saya dari Temanggung untuk membacakan pesan Beliau, judulnya "jangan takut di minta". Mohon didengarkan dengan baik-baik. Kalau kita didatangi orang yang susah itu tandanya Alloh sudah mempersiapkan kita untuk bisa membantu. Banyak membantu semakin banyak rezeki. Banyak orang takut didatangi orang susah karena logika berpikrnya "mereka yang butuh dan bakal merepotkan", padahal sebenarnya kita yang butuh mereka.

Suatu hari Rosulullooh memberitahu kepada para sahabatnya bahwa orang-orang miskinlah nanti yang akan memiliki kekuasaan. Sahabat bertanya, "kekuasaan apa itu ya Rosul?". Rosulullooh bersabda, "Di hari kiamat nanti akan dikatakan kepada mereka tariklah mereka yang pernah memberimu makan walaupun sesuap, minum walaupun seteguk, ilmu walaupun setetes, dan pakaian walaupun selembur, peganglah tangannya dan tuntunlah mereka ke surga". *Masha Alloh*. Akhirnya fakta sudah menunjukkan Bapak Menteri tadi menyampaikan telah menebar kebaikan untuk usulan aspirasi program. Saya berharap semoga dirjen, direktur, kabalai, dan satker jangan takut kalau di minta.

Terima kasih.

***Wassalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.***

**KETUA RAPAT:**

Pak Sudjadi dari Fraksi PKS ya?

Itu waktu kejadian Pimpinan berpelukan itu yang paling pertama *Whatsapp* di *group* internal Komisi V itu Pak Djadi Pak. Ijin saya baca boleh Pak? Ini *Whatsapp*-nya Pak Djadi ini:

“Syukur *alhamdulillah* kekompakkan dua tokoh bangsa ini dalam menyikap prestasi olah raga internasional oleh anak bangsa yang diwakili atlet silat nasional, menunjukkan suasana politik nasional dalam berbangsa dan bernegara. Bravo. Ini pelajaran bagi pimpinan dan para anggota Komisi V untuk mengevaluasi janji bahwa kita bersepakat satu fraksi Komisi V. Ayo para pimpinan dan anggota Komisi V bekerja bersama-sama dan kompak beri keteladanan seperti pemimpinmu memenangkan seluruh anggota Komisi V untuk terpilih kembali di pileg 2019. *Wassalam*”.

Tepuk tangan Pak, ini do'a kita semua Pak.

Pak Willem, dan terakhir Pak Henky.

#### **F-PD (WILLEM WANDIK S.Sos):**

Terima kasih Pak Ketua.

Pak Menteri, dalam RPJMN 2015-2019 disana dengan tegas disebutkan bahwa pembangunan nasional memberikan kebijakan terhadap percepatan pembangunan khusus bagi tanah Papua, dalam hal ini Provinsi Papua dan Papua Barat, karena sampai saat ini Papua masih memiliki status *lex specialist* sesuai semangat Undang-Undang 21/2001. Hal ini diperkuat lagi dengan keluarnya Peraturan Presiden Nomor 7/2017 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan tanah Papua, baik Provinsi Papua dan Papua Barat. Itulah sebabnya kebijakan presiden untuk meningkatkan konektivitas wilayah Papua dengan pembangunan infrastruktur transportasi darat untuk meningkatkan laju perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di tanah Papua melalui pembangunan jalan trans, jalan koneksi kawasan antar kabupaten, provinsi, dan juga kecamatan/desa, dimana targetnya 2019 ini dapat terkoneksi semua.

Oleh karena itu pada kesempatan ini kami juga turut memberikan apresiasi kepada Pak Menteri dimana jalan Jayapura menuju kawasan pegunungan Wamena sudah tembus beberapa bulan yang lalu, dan saat ini bisa dilewati kendaraan berat. Tentu ini akan mempengaruhi *cost* dan inflasi yang selama ini memang sangat mempengaruhi kawasan pegunungan tengah.

Oleh karena itu pada kesempatan ini kami juga menyampaikan sejumlah hal tentunya menjadi perhatian kita bersama ke depan, dimana ada sejumlah ruas trans nasional yang belum terkoneksi, belum tersambung, itu menjadi perhatian bersama ke depan. Secara detailnya akan kami sampaikan.

Terus yang berikut adalah, dimana jalan Merauke macet di tengah jalan, tidur di luar, karena mobil saya tertanam disitu. Harapan saya mungkin ini bisa kerjasama dari Bina Konstruksi dengan Dirjen Jalan. Karena kawasan ini memang dari tahun ke tahun tiap tahun sebagian anggaran tapi jalannya tidak pernah berubah, begitu saja. Baik jembatan maupun ruas jalannya begitu terus. Dan juga jalan dari Bopendigul tembus ke Yahukimo sampai hari ini juga harapan kami bisa menjadi perhatian ke depan.

Secara detail nanti kami sampaikan, mungkin pertemuan dengan eselon satu. Terutama dalam hal program bantuan perumahan itu kami harapkan untuk tahun 2019 ada 14 kabupaten masing-masing harapan kami kalau tidak 25 mungkin 30 unit bisa kebagian warga kita disana. Dan juga untuk bantuan stimulant rumah swadaya untuk Kabupaten Puncak, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Membramo Raya, Kabupaten Dalimo, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Mapi, Kabupaten Tolikara itu per kabupaten harapan kami 500 KK. Dan tentunya secara detailnya akan kami sampaikan saat pertemuan dengan eselon satu.

Dan juga untuk Dirjen Sumber Daya Air kami juga harapkan terkait dengan normalisasi sungai untuk kepentingan PON XX tahun 2020. Dan juga normalisasi sungai Konda Kabupaten Tolikara. Sebenarnya sudah pernah di survei sesuai dengan usulan kami pada tahun 2016, tapi hari ini kami belum pernah mendapatkan progresnya. Dan juga penanggulangan banjir dan pembangunan waduk sejumlah kabupaten akan kami sampaikan secara terperinci saat pertemuan eselon satu.

Dan yang terakhir, kami juga pada kesempatan ini menambahkan apa yang telah disampaikan oleh Pak Gatot, kami di titip pesan oleh Pak Gatot untuk menyampaikan ini, dimana berdasarkan hasil kunjungan Komisi 5 kemarin, juga didampingi oleh mitra, termasuk Kementerian PUPR, dimana jalan dari Kota Pacitan menuju pelabuhan itu kurang lebih sekitar 1,1 kilo itu memang agak terjal dan perlu diturunkan.

Dan juga sepanjang pinggir sungai dari ujung jembatan sampai menuju pelabuhan itu sisi kanan jalan itu tanggul yang di bangun itu sudah jebol. Sepertinya kami lihat waktu itu sebenarnya harus bangun bronjong dulu sebenarnya. Seharusnya bangun bronjong dulu, baru bangun tanggulnya. Tapi ini tanpa bronjong langsung taruh tanggul di atas, akhirnya begitu banjir terjadi abrasi sungai. Harapan kami ke depan dengan terbangunnya jalan ini tentu akan mempermudah akses untuk persiapan pembangunan pelabuhan di pelabuhan Enggolan.

Oleh karena itu kami juga sekali lagi memberikan apresiasi kepada Pak Menteri, karena kami melihat apa yang menjadi kerja-kerja Pak Menteri serta seluruh jajarannya hari ini juga sedang mengangkat harkat-martabat warga nusantara dimana sudah sejak dahulu kala telah digambarkan sebagai *gemah ripah loh jinawi toto tentrem kerto raharjo*. Tentu ini dapat mempengaruhi kreatifitas dan inovasi warga kita dengan terbangunnya akses dan juga pelabuhan jalan ini sehingga bisa memanfaatkan potensi-potensi sumber daya alam yang ada disana untuk memberdayakan diri dan juga membuka peluang kerja.

Sekian, terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih.

Jadi Pak Willem ini orang dari Solo, dapilnya Papua. Halus sekali orang Papua ini.

Pak Henky terakhir, silakan Pak.

**F-PDIP (DRS. HENKY KURNIADI, S.H., M.H):**

Terima kasih Ketua.

***Assalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.***

**Teman-teman dari Komisi V yang saya hormati.  
Bapak Menteri beserta jajarannya yang saya hormati.**

Semua sudah mengapresiasi Pak Menteri, karena apa yang sudah di bangun Pak Menteri *multi player effect*-nya itu sudah kemana-mana dan sudah bisa dirasakan di tempat. Terutama kalau kita melihat suasana pedesaan sekarang setelah ada Undang-Undang Desa diberi 800 sampai 1 miliar per tahun saya melihat kalau dulu sudah hilang yang namanya festival-festival di desa. Kalau saya melihat sekarang sudah mulai marak bulan Agustus ini dengan festival-festival di desa sehingga jalanan itu macet. Ini pertanda bahwa perekonomian di desa bergerak. Jadi kalau dulu ada di kenal revolusi kebudayaan desa mengepung kota, tapi kalau ini desa mengepung kota dalam bidang perekonomian. Karena itu sendi-sendi dasarnya secara pyramidal memang yang harus diperkuat pedesaan.

Kalau saya melihat sekarang suasana dari *public works* departemen ini berbeda dengan yang dulu. Jaman Pak Menteri ini ibaratnya versi kedua, mungkin sekarang mau 2.5. Saya yakin Bapak jadi menteri lagi ini. Ini sudah versi ketiga, jadi kalau sudah versi ketiga harus ada pemikiran yang *outstanding*. Bukan hanya jalan tol, karena jalan tol ini sudah berada dimana-mana. Karena siapapun jadi presidennya tetap membangun jalan tol.

Kalau saya melihat sekarang ini perlu membuat yang sungai. Sungai ini perlu di buat suatu jalan-jalan yang lewat sungai. Contoh di Singapura itu bisa di bangun seperti itu, dan otomatis membawa para partisipan swasta untuk membangun pinggirannya. Pemerintah itu hanya membuat bersih sungai tersebut, membuat regulasi yang jelas, sehingga partisipan swasta itu langsung membangun. Inilah yang membuat *multiplayer effect*-nya yang menjadi besar.

Jadi mulai sekarang ini kota-kota dilarang membangun jembatan yang rendah, karena sungai-sungainya itu berpotensi untuk dilalui satu kendaraan sungai. Jadi kalau aturan itu sudah jelas, jarak sempadannya sungai itu jelas disitu, sehingga dipinggiran sungainya itu pasti menimbulkan partisipan dari swasta itu untuk berperan serta. Membuat propertis jadi mahal disitu, dan membuat suatu daerah pembangunan yang luar biasa.

Kalau di Kalimantan itu sungainya lebar-lebar, mungkin membuat jalan paling bagus di kanan-kirinya sungai tersebut, sehingga mungkin ada suatu jalan-jalan besar di kanan-kirinya sungai. Ini membuat suatu pembangunan yang baru. Jadi kalau nanti sudah selesai 2.5 nya, kemudian menuju versi

ketiga itu sungai itu perlu satu pembangunan jalan tol di sungai-sungai itu, sehingga sungai itu suatu kekuatan yang besar buat kita. Selain jalan tol ada jalan sungai. Ini suatu pemikiran yang ini.

Kemarin saya mengatakan bahwa, salah satu contoh pemikiran *outstanding* itu Pak Ahok ketika membuat jembatan di Semanggi sana di luar APBN, hal yang tidak dipikirkan orang lain dipikirkan oleh dia, sehingga terjadi suatu *traffic light*, terjadi suatu perputaran yang *one stop*, jadi tanpa *stop* lagi. Jadi ini suatu pemikiran yang baru. Kalau generasi muda yang baru, seperti Eric Thohir itu *outstanding* pemikirannya. Jadi saya ini dari Komisi V ini hanya merangsang saja. Putra-putra bangsa sekarang ini banyak jadi putra-putra terbaik yang mempunyai prestasi yang *outstanding*, prestasi yang luar biasa. Saya melihat Pak Basuki ini sudah sulit ditandingi lagi. Jadi siapapun jadi presidennya itu pasti milih Pak Basuki, karena tidak ada yang lain. Kalau siapapun jadi presidennya itu pasti milik Pak Basuki, karena itu sulit ditandingi lagi. Jadi saya *eman-eman* Pak Menteri, jangan sampai versi kedua selesai, masuk versi ketiga, itu tidak ada pemikiran *outstanding* lagi.

Jadi pemikiran *outstanding* sungai Pak. Sungai ini kalau dikelola, Indonesia akan jadi luat biasa, dan propertinya jadi mahal sekali.

Terima kasih, saya pikir itu. Banyak yang bisa di apresiasi, saya melihat dari dimensi yang lain.

Terima kasih.

***Wassalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.***

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih.

Kalau Pak Lasarus tadi tegas ini, kalau Pak Jokowi tetap jadi presiden, Pak Menteri Pekerjaan Umum tetap Pak Basuki. Sekarang lebih negarawan Pak. Siapapun presidennya, pak menterinya Pak Basuki.

Pak Sigit mau pamit, kita beri Pak Sigit dulu.

**F-PKS (IR. H. SIGIT SOSIANTOMO):**

Terima kasih Ketua.

Ijin, Pak Menteri, mau ada keperluan yang tidak bisa diwakilkan, karena itu pesawat soalnya tidak bisa diwakilkan.

Pak Menteri, bukan aspirasi pribadi, tetapi betul-betul aspirasi terhadap korban bencana. Mengingatkan saja kepada Pak Menteri, beberapa pembahasan tahun lalu Pak Menteri sudah mengatakan sudah bukan tupoksi PUPR, yaitu masalah penanganan lumpur Lampindo. Tetapi kami juga sudah berusaha untuk mencari ruang inisiatif. Diantaranya kami mengundang dan minta bertemu Pimpinan DPR, Ketua DPR waktu itu Pak Setya Novanto dan Ibu Menteri Keuangan, ada Kepala Badan Anggaran juga. Kesimpulan dari rapat tahun lalu saat itu juga saat pembahasan juga bahwa Kementerian



Keuangan bisa mengalokasikan anggaran kalau tanah dari korban lumpur itu dibeli oleh negara, bukan di ganti. Jadi dibeli oleh perusahaan, kemudian dipinjami oleh perusahaan itu untuk membeli ini, bukan, tapi langsung di beli oleh negara.

Saya melihat dari laporan anggaran Pak Menteri ini minimal ada dua inisiatif baru yang baru kami ketahui. Pertama ada inisiatif baru tentang prasarana pendidikan. Dan angkanya besar, hampir 6 triliun, 6,5 triliun. Yang kedua adalah KPBU, saya kira itu inisiatif juga.

Pak Menteri, kami mohon bantuan, kami berharap nanti di dalam kesimpulan pembahasan dengan Komisi V ini ada apa inisiatif yang bisa kita usulkan. Sama-sama bencana Pak, Lombok juga ditangani. Ini juga bencana, dan mereka sudah hampir 15 tahun lebih, sejak 2005.

Bukan perusahaan, jadi penggantian kepada korban yang belum di ganti tanahnya. Bukan karena perusahaan, karena sertifikatnya di pegang oleh masing-masing orang pemilik tanah itu. Peta terdampak lumpur itu tanahnya dimiliki oleh pribadi-pribadi yang belum di ganti, yang sekarang ada alokasi anggaran untuk pekerjaan penanggulangan lumpur Lapindo sebesar 425 miliar rupiah di atas tanah-tanah mereka. Ini tanah pribadi yang dulu diambil oleh perusahaan tapi perusahaannya *collaps* tidak bisa meneruskan lagi. Jadi sertifikatnya diambilalih oleh mereka lagi. Adalah ketidakadilan, dan kita akan bertanggungjawab nanti kalau kita mengerjakan tanggulnya sementara tanahnya masih tanah masyarakat.

Pak Menteri, mohon di bantu nanti dalam inisiatif. Saya sudah sampaikan kepada Badan Anggaran, kepada Menteri Bappenas, Menteri Bappenas menjanjikan akan membahas dalam panja. Panjangnya pasti panja RKAKL kementerian, tapi saya lihat disini tidak muncul sama sekali.

Jadi saya kira itu saja harapan saya. Ini masa akhir tugas kami. Lumpur ini mungkin sudah 15 tahun, tiga kali masa jabatan anggota DPR. Saya kira kami butuh inisiatif baru. Seandainya lumpur ini bisa diselesaikan sekarang mungkin itu juga prestasi bagi pemerintah sekarang dan Pak Menteri juga. Dan angkanya tidak besar, 880 miliar. Bisa MYC (*multi years contract*). Yang penting adalah ada inisiatif baru, itu kira-kira poinnya.

Terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Mungkin bisa di respon dulu, silakan Pak.

#### **F-PKS (IR. H. SIGIT SOSIANTOMO):**

Pak Menteri, tanah di luar peta terdampak milik masyarakat sudah diselesaikan oleh pemerintah. Yang belum justru adalah tanah di dalam area peta terdampak yang bukan milik perusahaan tapi milik pribadi-pribadi. Jadi tidak lunas. Tetapi diatasnya ada pekerjaan tanggul Pak. Jadi Menteri

Kuangan tidak mau memberikan talangan itu. Tetapi bahwa Pak Menteri boleh bisa membeli tanah langsung masyarakat, itu yang penting.

Ini ada Pak Sungkono mungkin silakan melanjutkan. Mungkin saya ijin dulu, Pak Menteri. Saya kira tugas saya menyampaikan ini sudah selesai, kami akan ikuti perjalanan yang ada di Banggar. Kalau ada hal-hal yang kurang nanti kami akan tambahkan.

Terima kasih Pak Menteri.

#### **F-PAN (H. SUNGKONO):**

Terima kasih Pak Ketua.

Mohon ijin, Pak Basuki.

Penyampaian yang disampaikan oleh Pak Sigit itu fakta. Dari peta area terdampak yang dulu itu, sebetulnya tidak ada istilahnya perusahaan *to* perusahaan. Bahasanya kalau dalam yang berkembang itu kan *be to be*, artinya perusahaan yang pada posisi korban ini tidak bisa dikatakan normal. Jadi mereka tidak bisa bekerja itu bukan karena menjual pabriknya, karena pabriknya kena lumpur. Jadi kalau istilahnya di lepas sebagai bagian daripada tidak tanggungjawab perpres menurut saya kurang adil. Karena mereka aslinya bukan pada posisi normal menjual perusahaan pada posisi yang sehat, kalau batal bisa dikembalikan. Sekarang kan faktanya para korban ini/pengusaha ini tidak punya pabrik. Jadi ini persoalan. Saat *be to be* sudah lepas karena di putusan MK itu sudah tidak boleh lagi membedakan para korban. Maka dari itu saya mohon ijin dengan sangat, janganlah alasan *be to be* ini di buat menutup kewajiban negara untuk hadir. Jadi Pak Presiden juga janji dulu untuk menyelesaikan semuanya. Termasuk hari ini belum kelar. Sertifikat ini rata-rata masih di pegang pengusaha. Karena dulu kalau batal dikembalikan lagi pada pemilik perusahaan, artinya mereka pegang sertifikat. Jadi kalau ini masih dikatakan kurang valid rasanya.

Saya sudah sampaikan berkali-kali, dan ini harus bagian tanggungjawab moral bangsa kita, jangan sampai menduduki areal yang justru milik warga tapi negara mengambil manfaat yang ada di tanah itu penanggulangan lumpur Lapindo. Jadi menurut saya yang disampaikan Pak Sigit benar, mudah-mudahan ini juga terbuka bagi siapa saja. Karena saya secara pribadi mungkin Bapak Sigit dan saya, mudah-mudahan mereka tahu. Para korban ini total kurang lebih 30-an orang, masing-masing juga punya karyawan banyak, dan itu luar biasa penderitaannya. Jadi mohon jalan keluarnya bagaimana dengan kreatifitas pemerintah ini.

Barangkali itu tambahan saya, terima kasih.

#### **F-PDIP (DRS. YOSEPH UMAR HADI, M.Si):**

Interupsi, saya hanya memperkuat ini. Supaya bahwa kesannya ini tidak sifatnya dapil atau perorangan. Tapi saya sendiri juga merasakan bahwa

sejak dulu menjadi duri bagi kita di fraksi Komisi V ini. Oleh karenanya barangkali tidak bisa diselesaikan sekarang. Saya mohon perhatian dari Pak Menteri juga menugaskan stafnya untuk mempelajari lebih/menelaah lebih detail. Intinya bahwa kita harus sama-sama memperlakukan secara adil pada siapapun warga negara kita, pribadi maupun *company*. Sejauh dia orang Indonesia dan itu terkena suatu persoalan yang sama saya kira diperlakukan secara adil.

Terima kasih.

#### **F-PAN (H. SUNGKONO):**

Setengah menit saja, Ketua.

Jadi istilahnya *company* ini di luar perusahaan. Dan negara tidak membedakan antara *company* dan rakyat biasa. Di dalam peta, di luar peta, semuanya ada perusahaan. Kalau yang di dalam peta perusahaan di anggap persoalan berbeda secara saya rasa *case*-nya tidak adil. Saya pikir supaya masyarakat tahu kalau di luar itu perusahaan juga di ganti resmi oleh negara dengan APBN, rakyat juga di ganti. Kalau di dalam kan kewajiban Lapindo. Karena ketidakmampuan Lapindo itulah istilahnya pengusaha di tinggal bahasanya, dibuat istilahnya *be to be*. Pemerintah kemarin menalangi. Di dalam Undang-Undang APBN 2015 perubahan itu penjelasannya jelas Pasal 25.b itu mengatakan dana talangan yang diberikan oleh pemerintah untuk korban lumpur Lapindo untuk para pelaku biasa juga warga biasa, tapi pelaksanaannya hanya warga biasa. Barangkali ini kalau ngomong belakang/*setback* ada penyimpangan dalam APBN 2016 perubahan itu.

Terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Pak Menteri, sarannya Pak Yoseph tadi tolong didalami secara politis. Komisi V sudah memberikan dukungan. Kita sudah pernah rapat, terus Pak Menteri mengatakan ini kewenangan Kementerian Keuangan. Terus kita buat rapat gabungan, sudah pernah kita buat rapat gabungan dengan Menteri Keuangan, dengan Kementerian PUPR. Dan kemudian itu ditindaklanjuti di pembahasan di Badan Anggaran. Tadi Pak Sigit mengatakan kalau bisa kita selesaikan ini adalah prestasi dari pemerintahan sekarang juga.

Itu mungkin catatan yang mau disampaikan. Mudah-mudahan nanti dengan Pak Menteri bisa ada pembahasan lebih dalam tentang ini. Atau sebentar Pak Menteri bisa kasih pernyataan terakhir.

Ibu Neng dari Anggota paling terakhir, silakan. Tadi saya mau kasih duluan Ibu Neng, tapi Pak Anton bilang Ibu Neng kasih terakhir saja.

#### **F-PP (HJ. NURHAYATI):**

Sudah lupa Pak. Pak menterinya juga sudah beres-beres.

***Assalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.***

**Yang terhormat, Pimpinan.**

**Dan juga yang saya cintai, Pak Menteri serta jajarannya.**

Supaya lebih banyak di kasih programnya kalau bilang 'dicintai'. "*I love youfull*" katanya.

Jadi, Pak Menteri, saya melihat dari pertanyaannya Pak Iwan Aras tadi bahwa saya melihat disini ada pokok-pokok kebijakan belanjanya adalah efisiensi. Dengan dollar sekarang ini mencapai 15 ribu, jadi saya ingin menanyakan berapa nilai barang impor yang ada di program Bapak ini di belanja barang modal ini. Lalu berapa persen kebutuhan impornya ini dari belanja barang dan modal Bapak. Apakah itu ada pengaruhnya, karena kita sekarang sedang mengalami deficit transaksi berjalan.

Dan juga saya melihat ada skema baru yang Bapak lakukan disini. Saya juga ingin mendengarkan seperti Pak Johny Allen bahwa saya mau menanyakan posnya ini ada dimana. Apakah posnya ini ada di pos belanja, apakah di pos pembiayaan. Saya juga ingin menanyakan, apabila dia ada di pos belanja, saya juga ingin menanyakan IRR nya itu berapa persen. Dikarenakan apabila itu di atas 8-12 persen itu bisa diberikan di pos pembiayaan. Tapi kalau di bawah 8 persen, itu bisa ada di pos belanja kita. Itu karena apa, supaya tidak membebani APBN kita lagi. Apabila memang itu 8-12 persen, dan diberikan kepada swasta, atau saya lebih suka namanya itu PPP karena saya juga dari PPP, itu sebaiknya dikeluarkan dari pos belanja tetapi ada di pos pembiayaan, sehingga tidak membebani pos anggaran APBN kita atau rupiah murni di pos belanja kita. Apabila memang di atas 12 persen, sebaiknya terbuka, jadi tender terbuka. Itu yang saya cermati disini.

Dan juga saya meminta kalau program perumahan itu diberikan kepada daerah yang tingkat kemiskinannya itu tinggi sekali. Dikarenakan dari 14 indikator kemiskinan setengahnya itu adalah ada di rumah dan lingkungannya. Sehingga saya minta janji Bapak juga terhadap dapil saya pada saat tiga tahun lalu Bapak datang ke dapil saya bahwa akan diselesaikan kekumuhan di Kota Tasikmalaya. Kota Tasikmalaya itu kota termiskin di Jawa Barat. Jadi itulah butuh campur tangan Bapak disini. Dari dulu sudah menanyakan, tetapi tidak ada tindaklanjutnya dari Kementerian PUPR. Saya melihat apabila Bapak bisa menyelesaikan indikator perumahan ini, setengah kemiskinan kita tentunya akan bisa diselesaikan masalah kemiskinan di Indonesia.

Lalu yang saya ingin tanyakan lagi program rehabilitasi sekolah, itukan kita baru tahu disini. Mekanismenya bagaimana ini? Lalu apabila kita bisa mengajukan sebagai aspirasi kita, bagaimana mekanismenya? Disitu kita ingin juga, memang banyak sekali permintaan renovasi sekolah ke kami juga banyak apabila kita reses menyerap aspirasi. Tetapi apabila memang kita tidak diberikan untuk bisa mengajukan ya untuk apa di Kementerian PUPR anggaran ini yang 6 triliun. Lebih baik diberikan untuk jalan atau jembatan yang bisa diberikan kepada kita.

Dan untuk jembatan gantung di dapil saya juga sudah di survei. Lalu kadesnya sudah mengundang saya, sudah berterima kasih kepada saya, katanya mau di bangun. Tetapi tiba-tiba TA saya memberitahu saya bahwa di dapil saya itu dibatalkan untuk jembatan gantungnya. Urusannya apa saya tidak tahu. Saya juga melihat teman-teman saya semuanya sudah pada meresmikan jembatan gantungnya. Kalau saya hanya gantung saja, menggantung, tidak ada jembatannya. Padahal janjinya jembatan gantung, bukan menggantung. Makanya saya tambahkan 'dicintai' adi supaya jembatan gantung saya jadi jembatan, lalu kekumuhan di Kota Tasikmalaya yang Bapak janjikan tiga tahun lalu akan diselesaikan dalam tempo dua tahun itu bisa juga dilaksanakan oleh Bapak sesuai dengan janji Bapak terhadap masyarakat, bukan terhadap saya saja. Karena setiap saya reses itu ditanyakan oleh walikota, oleh masyarakat, "mana" katanya itu. Jangan-jangan mereka berpikir saya melemparkan program saya kepada daerah lain. Jadi saya juga ingin sekarang Bapak bisa mencatat itu.

Dan sekian dari saya.

***Wabillaahitaufiq Wal Hidaayah  
Wassalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.***

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih.

Dari anggota semua sudah menyampaikan.

**F-GERINDRA (Hj. NOVITA WIDJAYANTI, S.E., M.M):**

Pak Ketua, ijin, tadi terlewat satu. Ini mengenai nyawa, jadi penting sekali maksudnya. Saya kemarin baca di Detik mengenai siswa empat orang yang hanyut di sungai karena menyeberangi sungai setiap hari pada saat sekolah. Itu mengenai kayaknya jembatan gantung ini. Ini kejadiannya di Nias Selatan dan bukan dapil saya. Saya langsung WA kepada Pak Iwan untuk dapat perhatian. Tapi Pak Iwan bilang katanya diusulkan oleh Dewan. Yang saya khawatirkan disini tidak ada Dewan yang ada disini dan mengusulkan. Jadi *moment* ini atas nama kemanusiaan jangan sampai ada korban lagi hanyut, atau di tempat lain. Mohon apa dimungkinkan dari kementerian bisa proaktif untuk membangun jembatan gantung disana.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih.

Anggota sudah. Ini dari Pimpinan hanya Pak Ibnu saja yang mau menyampaikan beberapa catatan.

Silakan, Pak Ibnu.

**F-PG (DRS. H. IBNU MUNZIR):**

***Assalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.***

**Pak Menteri, Ibu Sekjen, Pak Dirjen, seluruh Eselon I/II jajaran Kementerian PUPR yang saya hormati, Pimpinan dan seluruh Anggota yang terhormat.**

Pak Menteri, ada tiga hal yang ingin saya sampaikan. Hanya ringaringan saja, tidak ada yang berat. Mungkin kalau berat muatannya saja yang berat.

Yang pertama bahagian apresiasi, dan ini sudah saya anggap cukup, tidak perlu saya sampaikan lagi, terwakili apa yang disampaikan Pak Djadi tadi. Karena titik berangkatnya juga sama yang ingin saya sampaikan bahwa apresiasi dari wakil presiden itu. Jadi kita semua patut berbangga saya kira di Komisi V terhadap prestasi yang ditorehkan oleh Pak Menteri dalam Asian Games ini.

Bagian kedua yang ingin saya sampaikan sebagai tanggung jawab dari hasil kunspek (kunjungan spesifik) dari Komisi V waktu itu ke Papua Barat, ke Kota Manokwari. Ada beberapa hal yang menjadi poin catatan yang saya kira secara tertulis nanti akan lengkap kami berikan, karena itu terkoordinasi dengan sektor lain.

Yang pertama terkait dengan masalah jalan. Ini ada perluasan bandara yang ingin dikembangkan oleh pemerintah daerah dimana memerlukan koordinasi antara Perhubungan dengan pihak PUPR. Ini jalan akses ke terminal penumpang.

Kemudian yang kedua yang terkait dengan jaringan air baku di Distrik Amban. Air baku ini untuk mensuplai kepentingan dan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Manokwari. Persoalan yang mendasar bahwa jaringan ini sudah selesai sejak lama, kurang lebih hampir dua tahun, tapi belum diserahkan ke pemerintah kota. Ini menimbulkan pertanyaan ada apa sampai masalah ini belum diserahkan untuk bisa dimanfaatkan di masyarakat.

Kemudian yang berikutnya yang terkait dengan pencemaran dari limbah hotel ke sumber air minum di masyarakat. Ini di Pantai Panindi Kabupaten Manokwari. Ini saya kira bagian daripada Dirjen Cita Karya atau Ditjen Cipta Karya yang tentu saja perlu menangani hal ini. Walaupun kita sudah melakukan upaya untuk pembenahan kota kumuh di sekitar itu, tetapi persoalan air minum/air bersihnya ini tercemar oleh limbah hotel.

Kemudian mengenai penyediaan perumahan dan fasilitas umum. Seperti rumah ibadah, rumah sakit. Ini di Desa Egoan di Manokwari. Ini juga masalah yang mereka inginkan atau mereka menuntut agar bisa dipenuhi oleh pihak pemerintah. Ini bagian kedua yang ingin saya sampaikan sebagai menjadi perhatian. Nanti teknisnya akan kami sampaikan secara lengkap dalam proses koordinasi.

Bagian yang terakhir, bagian ketiga, ketika saya membaca bahannya Pak Menteri ini dari apa yang dipresentasikan saya buru-buru buka peta, khususnya peta Sulawesi. Saya lihat jangan-jangan Sulawesi Barat sudah hilang di peta, tapi begitu saya buka ada ini merah. Jadi saya buat merah begini ternyata masih ada peta Sulawesi Barat ini. Apa kaitannya, karena

saya lihat di buku ini tidak ada sama sekali menyebut Sulawesi Barat. Jadi saya buka-buka mana ini bahan yang terkait dengan pembangunan Sulawesi Barat, tidak ada ini. Jangan-jangan sudah tidak ada di peta, ternyata saya buka petanya masih adanya. Berarti mungkin saya belum dapat informasi detail dari program Bapak ini yang menyebutkan Sulawesi Barat. Karena beberapa waktu yang lampau saya menyampaikan itu ketika saya bicara tentang jalan nasional pada saat terjadi banjir, dan kemudian jalan nasional itu sempat putus beberapa hari, yang kemudian ada usulan dari pemerintah daerah untuk mengalihkan jalan nasional itu ke dalam, dan itu belum sama sekali terlihat.

Kemudian jembatan di sekitar Mamuju Tengah di Topo itu yang sudah turun beberapa sentimeter ke bawah landasannya, ini menimbulkan kemungkinan berbahaya buat masyarakat. Dan kalau itu putus sama sekali, jalan nasional kita bisa putus.

Kemudian berikutnya juga terkait dengan usulan mengenai di jalan nasional itu juga ada jembatan yang hanyut, kemudian terjadi pembenahan. Dan ada beberapa usulan jembatan yang terkait dengan itu. Karena selalu saya mengatakan Sulawesi Barat itu berada di antara laut sepanjang 700 kilo, kemudian gunung, dan ditengahnya membelah sungai, maka rawan sekali terjadi abrasi, terjadi sungai yang meluap, yang kemudian jika tidak di tanggul menimbulkan bencana. Salah satu yang saya dapati di Ampalas itu di Mamuju Tengah sampai ada sekolah yang hilang kemakan abrasi. Jadi kalau ada rehabilitasi sekolah yang terkait dengan ini, ini menjadi pertimbangan yang saya kira perlu dipikirkan. Kemudian juga ada beberapa desa yang hilang di sekitar Mamuju Utara akibat daripada luapan Sungai Larian.

Ini beberapa hal yang saya secara umum saja. Tapi mudah-mudahan dalam koordinasi teknisnya nanti dengan eselon satu termuatlah beberapa program-program itu yang terkait. Termasuk juga jembatan gantung, karena ada di beberapa desa kita yang anak sekolah itu menyeberang di pandu atau pakai tali di tokoh-tokoh masyarakat disitu atau pemerintah desa yang menyebabkan saya kira selain kesulitan bagi anak sekolah ini, dan juga mungkin bisa memakan korban jiwa kalau tidak mendapatkan penanganan sesegera mungkin.

Ini tiga hal yang ingin saya sampaikan secara singkat dan ringan-ringan tapi berat isinya. Tapi kalau dipenuhi menjadi ringan juga untuk saya sebagai dapil saya.

Terima kasih.

***Wassalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.***

#### **KETUA RAPAT:**

Sebentar, kita selesaikan dulu. Mungkin Pak Menteri akan menjelaskan. Kalau belum puas, saya buka lagi. Semua sudah, Pak Menteri, seluruh anggota menyampaikan. Paling tidak ada empat catatan penting.

Yang pertama, Komisi V hampir semuanya anggota memberikan apresiasi atas kerja-kerja yang dilakukan oleh Pak Menteri berkaitan dengan kerja-kerja infrastruktur yang sudah jalan ini. Tadi sudah Pak Menteri bahkan sudah menjelaskan tentang permintaan atau hasil tindak lanjut dari rapat dengar pendapat kita tadi, tapi masih juga banyak anggota yang mendalami.

Yang kedua, pertanyaan yang mendasar berkaitan dengan dukungan pembangunan infrastruktur pendidikan itu seperti apa. Yang ketiga, tadi lumpur Lapindo itu bagaimana. Dan terakhir dampak kurs dollar terhadap pembangunan infrastruktur kita.

Nanti yang lain-lain mungkin bisa secara tertulis saja. Nanti yang jawab para eselon satu nanti yang teknis-teknis.

Kami persilakan Pak Menteri.

## **MENTERI PUPR:**

Terima kasih.

## **Pak Ketua dan Bapak-bapak Pimpinan.**

Sebelum menjawab pertanyaan Bapak, saya ingin memuaskan Ibu Neng dulu sebenarnya ini. Tapi Beliau tidak ada.

Jadi seperti yang disampaikan Pak Ketua pertama tentang masuknya program perbaikan prasarana pendidikan, ini bisa kami laporkan. Penugasan sebetulnya pada saat sidang kabinet. Makanya di dalam laporan kami juga ada berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri Bappenas. Didalamnya ada catatan, sesuai surat bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan sekian-sekian tanggal 19 Juli, hal pagu anggaran KL dan penyelesaian RKAKL tahun 2019. Itu ditugaskan kepada Menteri PUPR. Dan itu ditindaklanjuti dengan perpres. Karena kalau tanpa perpres saya tidak akan berani melakukan itu. Jadi seperti halnya di Asian Games kita memperbaiki GBK itu dengan inpres semua. Pasar Bukit Tinggi, Pasar Aksara di Sumut, Pasar Johar, itu juga dengan inpres ditugaskan kepada Kementerian PUPR.

Kembali ke prasarana pendidikan ini. Di dalam sidang cabinet di lihat ini kita selalu 20 persen anggaran pendidikan naik, tapi banyak sekali sekolah-sekolah yang rusak, dan indeks mutu pendidikan Indonesia tidak naik-naik. Sehingga diputuskan 2019 agar kegiatan fisik prasarana pendidikan ditugaskan kepada Kementerian PUPR sehingga para guru/para pendidik khusus fokus kepada kegiatan belajar mengajar. Tadinya ingin dimasukkan dalam Undang-Undang APBN 2019. Tapi karena ini penugasan makanya dimasukkan di dalam perpres dulu, belum di dalam Undang-Undang APBN 2019. Itu dasarnya. Sehingga programnya pun kami berkoordinasi dengan Kementerian Dikbud untuk SMA ke bawah. Dan Kementerian Agama untuk madrasah, Ibtidaiyah. Dan Ristekdikti untuk perguruan tinggi yang bangunannya belum diselesaikan. Jadi programnya dari ketiga kementerian itu. Sehingga kami membentuk PMU sendiri di Kementerian PUPR untuk bisa berkoordinasi dengan ketiga lembaga atau ketiga kementerian tersebut, dan kami membuat MOU nya. Sehingga kami nanti pelaksanaannya tetap bersama dinas, tapi tetap yang mengerjakan. Ini kami sedang terus berinteraksi dengan terutama yang Dikbud ini yang 14 ribu ruang sekolah yang akan diperbaiki itu tadi.

Kalau tadi pertanyaannya Pak Umar Hadi "masih bisa?". Mungkin bisa, karena ini belum diputuskan. Tapi itu harga satuannya dan sebagainya



menyangkut 14.150 ruang kelas. Lokasinya dimana yang tahu pasti Dikbud, jadi kami berkoordinasi dengan mereka.

Jadi dasarnya/*legal bases*-nya disitu, keputusan sidang cabinet, kemudian alokasinya berdasarkan surat bersama Menteri Bappenas dan Menteri Keuangan, kemudian penugasannya dengan perpres, dan programnya berkoordinasi terus dengan ketiga kementerian tersebut.

#### **KETUA RAPAT:**

Pak Menteri, ini *positioning*-nya itu berbeda dengan dukungan kita dalam pembangunan infrastruktur Asian Games. Kita ingat Cipta Karya, itukan dananya tersedot cukup banyak pada saat pembangunan infrastruktur. Saya lihat agak berbeda ini, berbedanya di tambah. Dari kita kemarin pembahasan raker itu 13,4 triliun, sekarang menjadi 20,2 triliun. Jadi ini tidak mengganggu kerja-kerja Cipta Karya.

#### **MENTERI PUPR:**

Tidak. Itu diambilkan uangnya dari Dikbud, dari Dikti, dari Agama.

#### **KETUA RAPAT:**

Cuma nanti tolong juga dialami. Inikan pagu kebutuhan untuk Cipta Karya itu juga 20,9. Jadi inikan intinya uang ini berbeda dengan kita punya uang banyak kemarin Cipta Karya tersedot dalam pembangunan infrastruktur. Itu yang ditanyakan salah satunya anggota. Dan usulan terhadap pembangunan infrastruktur sekolah ini koordinasi dengan Dikbud, tapi kalau ada temuan-temuan dari anggota juga bisa kita kasih usulan.

#### **MENTERI PUPR:**

Saya kira tadi saya dengan Dirjen Cipta Karya ini sedang dalam interaksi, jadi masih bisa di akomodasi.

#### **F-PDIP (IR. SUDJADI):**

Saya interupsi, Ketua.

Pengalaman ini sudah pernah terjadi tahun 1985, 1986, sampai 1987, yaitu penugasan kepada Kementerian PU dari Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesehatan. Program, sasaran, dan usulan itu dari *owner*. Kemudian Kementerian PU itu mendapat penugasan. Lalu biasanya dilanjutkan dengan KSB antara menteri. Diturunkan lagi KSB antar dirjen. Jadi seluruh sasaran dan program itu *given* dari kementerian yang punya anggaran dan punya otoritas itu.

Saya kira itu supaya *clear*. Jadi saya kira tidak akan mengganggu jatahnya Kementerian PU yang memang menjadi haknya PU. Jadi ini titipan, karena Kementerian PU itu di anggap mempunyai kemampuan lebih daripada kementerian yang bukan pembangun.

Saya kira terima kasih, mohon maaf ini, ini pengalaman.

## **F-PD (DRH. JHONI ALLEN MARBUN, M.M):**

Pimpinan, Pak Menteri, karena di dalam penjelasan penyelesaian pembangunan kampus mangkrak tiga bulanan perguruan tinggi. Oleh karena itu saya informasikan, ini dulu Departemen Agama, sekolah tinggi yang di Sibonggol, itu tiga tahun mangkrak. Bahkan besinya itu sudah ini. Itu supaya jadi masukan, karena saya kunjungan kemarin. Sekolah Stakpim namanya, yang Siborong-borong. Itu tadinya dari Departemen Agama.

Terima kasih.

## **MENTERI PUPR:**

Yang kedua tentang lumpur Lapindo. Saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Sigit sama barangnya. Hanya mungkin kita membedakannya supaya mudah ini tentang tanah masyarakat dan tanah para perusahaan. Sekarang yang masyarakat ini sudah di bayar sudah lama. Yang perusahaan ini sesuai dengan Keputusan MK kan juga harus di ganti. Cuma pada saat itu kan harus diputuskan di sidang kabinet. Waktu itu diputuskan baru yang masyarakat dulu yang diutamakan. Yang di perusahaan ini karena ada mesin, ada aset, ada asuransi, pemerintah tidak ingin iku campur itu dulu. Tapi sekarang menurut aspirasi hanya minta di ganti tanahnya saja. Saya sudah laporkan kepada presiden, akan di bawa di ratas, karena akan diputuskan di sidang kabinet. Jadi waktu itu saya mohon kalau bisa putusin oleh DPR, alokasikan. Tapi kan juga di Banggar kan belum diambil putusan. Kemudian saya laporkan kepada presiden untuk bisa kita rataskan saja supaya semua mendengarnya. Sampai sekarang belum dirataskan karena baru dua minggu yang lalu saya laporkan kepada Beliau.

Yang ketiga, mohon maaf dengan Pak Hamka. Tadi *legal bases* pendidikan sudah. Balai-balai di Cipta Karya sudah disepakati, sudah disetujui. Tapi akan diberlakukan 2019. Kami sekarang sedang mempersiapkan *assessment* orang-orangnya, sedang kami siapkan semua untuk membentuk balai-balai Cipta Karya itu tadi. Kemudian nanti 2019 kita sudah bisa mulai.

Kemudian untuk yang tercinta, Ibu Neng, TKBN di PUPR. Ini kemarin juga kami kebetulan ikut ratas tentang dampak kurs ini. Untuk PUPR dampak kurs ini seperti disampaikan oleh Menteri Keuangan bahwa presiden di TV kita bisa mendengar bahwa yang utamanya adalah investasi dan mengurangi impor dan meningkatkan ekspor.

TKBN di PUPR ini sekitar 90 persen lebih. Kecuali Binamarga, karena Binamarga yang banyak impor adalah aspalnya. Produksi Pertamina hanya 344.000 ribu ton per tahun, kebutuhannya sekitar 1,6 juta ton per tahun, sehingga kita impor. Sehingga di Binamarga TKBN nya sekitar 76 persen. Apa yang akan kita lakukan? Memanfaatkan aspal Buton ini, meningkatkan aspal Buton supaya lebih cepat lagi. Dampaknya apa? Tidak ada dampaknya di PU. Jadi tidak ada yang diperintahkan untuk di *suspend* proyek-proyek PU ini. Di TV kan sudah diberitakan 15.000 megawatt itu yang akan di tunda 1

tahun. Tapi kalau di PU semua proyek jalan semua. Kalau mau eskalasi saya kira tidak bisa, karena harus ada keputusan secara nasional *force major* atau kahar baru bisa eskalasi. Selama tidak ada keputusan kahar tidak akan bisa eskalasi.

Kemudian tentang perumahan ini juga banyak PS-PS, saya kira saya akan jawab mulai dari senior saya ini, Pak Anton Sihombing. Kalau 2018 seandainya 700, PS-PS 2019 akan diperbanyak. Saya kira ini ada Dirjen Perumahan, penuh itu.

Tapi tadi juga seperti Pak Hamka, kami sudah sampaikan tadi, mungkin Bapak belum sampai. Jadi seperti padat karya irigasi, P3TGAI, kemudian PS-PS, Kotaku, PISU, kalau bisa disepakati akhir tahun ini, sehingga Januari kita bisa mulai. Selama inikan yang lama kesepakatan lokasinya. Jadi kalau ini bisa sebelum akhir 2018 ini bisa disepakati Bapak-bapak si SK kan, Januari kita mulai, semua pasti mendapatkan manfaatnya, dapil, dan kita semua dapat. Saya kira sudah sama Pak.

Jembatan gantung, Ibu Neng, saya kira disini ada dua yang di Tasikmalaya, Ciwulan dan Cijalu. Ini nanti Desember selesai.

**F-PP (HJ. NURHAYATI):**

Interupsi, Pimpinan.

TA saya baru melaporkan kepada saya bahwa itu dibatalkan.

**MENTERI PUPR:**

Ini ada, Ibu. Mohon Ibu percaya saya, saya tidak pernah akan PHP Ibu.

**KETUA RAPAT:**

Tapi, Pak Menteri, saya ingatkan, Bapak kalau mau ngomong sama anggota harus melalui.

**MENTERI PUPR:**

Ini sudah ada, Ibu. Jadi di tahun 2018 ini ada 134 jembatan gantung. Yang Desember ada 84, sebelumnya ada 50. Nanti 2019 ada 166. Itu semua punya anggota kita ini, silakan diprogramkan. Kami semua untuk menggantikan Indiana Jones jembatan itu.

**F-PDIP (IR. SUDJADI):**

Pak Ketua, saya usul Mbak Neng itu turun ke lapangan di lihat. Jangan suruhan TA terus. Dengan Pak Watimpres biar *update*.

**MENTERI PUPR:**

Kalau kapan-kapan bisa anterin, Ibu.

Kalau untuk yang kawasan kumuh saya kira ini sudah berapa kali saya minta dirjennya. Kebetulan Pak Srihartoyo pensiun, jadi sekarang ada Pak Dirjen Dani. Saya kira sesama orang Sunda mudah-mudahan tidak lupa lagi.

Saya kira itu Bapak. Yang lainnya teknis bisa nanti di eselon satunya. Jalan akses yang ke Pacitan, saya sudah kesana. Pada saat saya di lapangan saya telepon Pak Menteri Perhubungan, apakah ini prioritasnya Menteri Perhubungan. Pada saat itu di jawab “belum”, karena disana ada dua calon pelabuhan. Satunya yang ada di daerah wisata, yang satunya yang Gelon ini. Kalau sekarang misalnya kemarin sudah disampaikan di Komisi V ini menjadi prioritas, saya harus masuk. Itukan dekat jembatan yang baru itu, jadi saya telepon langsung kepada Pak Menteri Perhubungan waktu saya di lapangan. Karena tidak menjadi prioritasnya Beliau, saya mundur dulu. Kalau sekarang menjadi prioritasnya Menteri Perhubungan pasti akan kita. Tidak terlalu panjang jaraknya.

Saya kira itu, Bapak Pimpinan.

**F-PD (AGUNG BUDI SANTOSO, SE., MM):**

Pimpinan, sedikit.

Saya minta sedikit saja, Pak Menteri, yang progress yang di Banjir Melong itu sudah seberapa jauh. Itu saja Pak.

**MENTERI PUPR:**

Kalau banjir di Cimahi, Cilember, mungkin Pak Dirjen ada.

**KETUA RAPAT:**

Dirjen jelaskan nanti eselon satu. Sekarang mau dijelaskan atau nanti Pak?

**F-PD (AGUNG BUDI SANTOSO, SE., MM):**

Sedikit saja biar tahu Pak, buat laporan kami ke dapil.

**DIRJEN KEMENTERIAN PUPR:**

Seperti diketahui kita sudah melaksanakan 2017. Cuma masalahnya kan kembali lagi di tanah. Jadi ini musti sinkron dulu tanahnya, dikerjakan dulu. Untuk 2019 nanti kita anggarkan kalau memang tanahnya siap. Jangan sampai nanti uangnya kembali lagi. Desain sudah Pak.

Terima kasih.

**F-PG (DRS. H. IBNU MUNZIR):**

Pak Ketua, *stressing* dulu satu masalah saya kira.

Ini menjadi perhatian Pak Menteri, kalau setiap kunspek kita ada soal yang menjadi titik tekan dari hasil temuan komisi di lapangan saya kira itu juga menjadi prioritas. Bahwa nanti menjadi di *connect*-kan dengan kawan-kawan yang ada dapilnya disitu supaya tahu soal saya kira itu bisa kita

lakukan di belakang. Tapi agar apa yang dilakukan Komisi V itu mendapat perhatian. Dan orang di daerah kan merasa ini sudah kunjungan komisi tidak bisa di realisir. Salah satu yang saya kira kalau tidak salah teman-teman Komisi V ke Sulbar itu mengenai program sumber daya air, itu menjadi perhatian saya kira.

**MENTERI PUPR:**

Tolong *slide* halaman 4, supaya mengingatkan semua, jadi untuk kita semua ini Pak, pokok-pokok kebijakan belanja 2019. Bapak bisa baca nomor satu, program prioritas kita adalah *directive* presiden/wakil presiden hasil sidang kabinet, raker, RDP, dan kunker DPR. Jadi Bapak bisa nanti dengan eselon satu ini di pegang Pak. Kalau Sulbar tadi tidak ada disini, inikan 'antara lain'. Nanti kalau semua 34 provinsi di sebut semua nanti.

**KETUA RAPAT:**

Nanti Bapak lihat saja nanti di rapat eselon satu apakah peta Sulbar masih ada atau tidak.

**MENTERI PUPR:**

Terima kasih. Mohon maaf kalau ada *celometan* yang tidak ini.

**F-PD (DRH. JHONI ALLEN MARBUN, M.M):**

Hanya mengingatkan saja tadi pertanyaan saya untuk Menteri kepada eselon satunya nanti soal vertikal *cutting*, sama Bogor tolong menjadi perhatian.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Kita langsung ke kesimpulan.

**F-GERINDRA (Hj. NOVITA WIDJAYANTI, S.E., M.M):**

Pak Ketua, ijin.

Tadi kan dari pertama sampai terakhir banyak yang bertanya. Kalau belum ada yang di jawab mohon ada jawaban tertulis atau pada saat rapat nanti dirjen menjawab. Jangan sampai nanti di ulang lagi besok.

Terima kasih.

**MENTERI PUPR:**

Saya jawab dulu, Ibu Novi.

Untuk Kaliasa itu sekarang baru di teken kontraknya untuk pengerukan. Yang kemarin untuk Tanggul Muara 300 meter bukan untuk *beautifcation*, tapi setelah ini sudah ada kontrak untuk pengerukan Muara Kaliasa.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Jadi cukup ya. Saya sendiri, Ketua, tidak kasih pertanyaan, tidak mengajukan, karena saya kira saya sudah ajukan waktu rapat sebelumnya. Nanti pada saat eselon satu saya lihat saja.

**KETUA RAPAT:**

Kesimpulan Rapat  
Kerja Komisi V DPR RI Dengan  
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
6 September 2018

1. Komisi V DPR RI memahami penjelasan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terhadap alokasi anggaran dalam RAPBN Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:

Pagu Kebutuhan 138 triliun 363 miliar 546 juta 44 ribu rupiah. Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2019 110 triliun 731 miliar 599 juta 735 ribu rupiah. Kekurangan 27 triliun 631 miliar 946 juta 309 ribu rupiah. Ada tanda bintang. Selain itu terdapat pendanaan melalui skema kerjasama Pemerintah-Badan Usaha *availability payment* KPBUAP pada Kementerian PUPR sebesar 5,1 triliun. Komisi V DPR RI bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan memperjuangkan kekurangan anggaran sesuai dengan mekanisme pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang APBN di DPR RI.

2. Komisi V DPR RI dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sepakat untuk mencarikan solusi penyelesaian lebih lanjut terhadap penanganan ganti rugi korban di peta area terdampak akibat bencana semburan lumpur Sidoarjo;
3. Komisi V DPR RI dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sepakat bahwa program-program strategis nasional yang bermanfaat bagi rakyat pada umumnya, serta program-program yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat di kabupaten/kota tertentu akan disesuaikan dengan saran, pendapat, dan usulan Komisi V DPR RI sebagaimana disampaikan dalam rangka rapat pembicaraan terdahulu RAPBN Tahun Anggaran 2019, serta disesuaikan dengan hasil pembahasan alokasi anggaran untuk fungsi dan program masing-masing unit eselon satu dalam Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2019 pada rapat dengar pendapat mendatang.

Anggota, setuju?

**RAPAT : SETUJU**

**F-PG (DRS. HAMKA BACO KADY, MS):**

Sebentar Ketua, ijin.

Menyangkut penambahan anggaran bisa di cabut kembali dulu Ketua?

**KETUA RAPAT:**

Oke, saya cabut kembali.

**(Persetujuan di cabut)**

**F-PG (DRS. HAMKA BACO KADY, MS):**

Selanjutnya, 'Komisi V bersama Kementerian Pekerjaan Umum memperjuangkan kekurangan anggaran' saya kira ini sudah tidak perlu lagi. Kalau yang kemarin itu masuk lah. Ini hampir belum kita usahakan sudah dimasukkan. Apakah yang lain dimasukkan itu?

**KETUA RAPAT:**

Ini masih ada kekurangannya 27,6 triliun. Mudah-mudahan bisa ada tambahan.

Baik, kita ketuk ya untuk teman-teman Anggota.

**RAPAT : SETUJU**

Pak Menteri, setuju?

Demikian kesimpulan Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 6 September 2018 sebagaimana yang telah saya bacakan tadi.

**RAPAT : SETUJU**

Pak Menteri kami persilakan sebagai sambutan akhir untuk kita. Ini tahun depan, tahun 2019, kita memberikan apresiasi yang luar biasa. Dan untuk itu kita harapkan tahun 2019, baik pemerintah dari Pak Menteri dengan jajarannya semua berhasil, sukses, dan kitapun disini juga bersama-sama kita merayakan keberhasilan kita di dalam pembangunan infrastruktur.

Kami persilakan Pak Menteri.

**MENTERI PUPR:**

**Bapak Pimpinan, Ibu dan Bapak Anggota Komisi V yang kami cintai dan banggakan,**

Terima kasih atas semua sarannya. Saya hanya ingin satu, karena ini juga mungkin kesempatan kita untuk memenangkan 2019 semuanya. Jadi untuk program-program sekali lagi kalau bisa disepakai sebelum akhir

Desember ini sehingga Januari bisa kita implementasikan bersama. Karena prestasi kita kerja kita semua.

Terima kasih.

***Wassalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.***

**KETUA RAPAT:**

Sekali lagi terima kasih Pak Menteri dan seluruh jajarannya, teman-teman Pimpinan dan Anggota Komisi V. kalau tidak ada hal yang substansi maka kita tutup rapat kerja kita bersama dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan ucapan:

***Wassalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.***

***Shalom.***

**KETOK PALU : 3 KALI  
(Rapat di tutup pukul: .....WIB)**